

LAPORAN KINERJA

BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
TAHUN 2021



Disusun Oleh :
Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, program, dan kegiatan di lingkungan Biro Protokol dan Humas yang mencangkup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Protokol dan Humas melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh empat bagian di lingkungan Biro Protokol dan Humas.

Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 serta sebagai acuan bagi peningkatan program kerja dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua peraturan tersebut selanjutnya diinternalisasi ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Protokol dan Humas tahun 2021. Selain itu, Laporan Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Semoga Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Deputi Persidangan secara khusus dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga saat ini, Laporan Kinerja ini dapat kami selesaikan. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukannya untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 10 Januari 2022
Kepala Biro Protokol dan Humas



Drs. Suratna, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Protokol dan Humas tahun 2021 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2021 dalam mencapai sasaran program/kegiatan yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari sasaran program/kegiatan tersebut, Laporan kinerja Biro Protokol dan Humas berhasil mencapai target 100% (sangat baik). Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan tercapainya kinerja dan terdapat capaian penghargaan dari unit kerja di lingkungan Biro Protokol dan Humas, sebagai berikut:

1. DPR RI menerima penghargaan dengan kategori “Memuaskan” sebagai peringkat VII tingkat Lembaga Negara Setingkat Kementerian dan Lembaga Non Struktural Berdasarkan hasil pengawasan Kearsipan Tahun 2021;
2. PPID DPR RI meraih Kategori “Informatif” dengan nilai 96,52 pada tingkat Lembaga Negara dari hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat;
3. PPID DPR RI menerima penghargaan Silver Winner Website PPID Terinovatif pada tingkat Lembaga Negara;
4. Pencapaian realisasi serapan anggaran Biro Protokol dan Humas sebesar 96,58% yang melebihi dari target yakni 92,5%; dan
5. Presentase jumlah keluhan di bidang layanan keprotokolan yang menurun dari 10% menjadi 4%.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran Rencana Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 ini didukung anggaran yang dialokasikan untuk Biro Protokol dan Humas dengan nilai sebesar Rp.32,896,725,000,-. (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Biro Protokol dan Humas yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan secara sistematis dengan indikator-indikator dan target-target yang ditentukan dan dilaksanakan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas ini juga merupakan sarana introspeksi dan evaluasi peningkatan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya terhadap program dan kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran agar lebih optimal sebagaimana capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,58%.

Laporan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekaligus sebagai pertimbangan dalam perumusan Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, serta Rencana Kerja Anggaran pada periode tahun anggaran selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. UMUM
- B. STRUKTUR ORGANISASI
- C. TUGAS DAN FUNGSI
 - C.1. BAGIAN ASIP
 - C.2. BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM
 - C.3. BAGIAN PERPUSTAKAAN
 - C.4. BAGIAN PROTOKOL
- D. PERMASALAHAN STRATEGIS
 - 1. LAYANAN ARSIP
 - 2. LAYANAN KEHUMASAN DAN PENGELOLAAN MUSEUM
 - 3. LAYANAN PERPUSTAKAAN
 - 4. LAYANAN PROTOKOL

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
- B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
 - 1. BAGIAN ARSIP
 - 1.1. PEMBINAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
 - 1.2. PEMINDAHAN ARSIP
 - 1.3. PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP
 - 1.4. PERAWATAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
 - 1.4.1. PERAWATAN ARSIP MEDIA BARU
 - 1.4.2. PERAWATAN ARSIP KONVENSIONAL
 - 1.4.3. DIGITALISASI / ALIH MEDIA
 - 1.5. PENYUSUTAN ARSIP
 - 1.6. PELAYANAN KEARSIPAN
 - 2. BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLA MUSEUM
 - 2.1. PPID
 - 2.2. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
 - 2.3. EDUKASI PARLEMEN
 - 2.4. MUSEUM
 - 2.4.1. KUNJUNGAN FISIK MUSEUM
 - 2.4.2. VIRTUAL MUSEUM
 - 2.4.3. SEMINAR MUSEUM

- 2.4.4. PAMERAN MUSEUM
 - 2.4.5. GRAND DESIGN MUSEUM
 - 2.5. PARLEMEN REMAJA
 - 2.6. PARLEMEN KAMPUS
 - 2.7. BAKOHUMAS
 - 2.8. KEGIATAN MAGANG
 - 2.8.1. PELAKSANAAN MAGANG
 - 2.9. SOSIAL MEDIA
 - 2.9.1. EDUKASI PARLEMEN
 - 2.9.2. PPID
 - 2.9.3. MUSEUM
 - 2.9.4. KUNJUNGAN MASYARAKAT
 - 2.10. PENCAPAIAN
 - 2.10.1. PR INDONESIA AWARD 2021
 - 2.10.2. MONEV KIP – PPID INFORMATIF
- 3. BAGIAN PERPUSTAKAAN
 - 3.1. PEMBUATAN KEBIJAKAN MENGENAI TATA KELOLA PERPUSTAKAAN
 - 3.2. PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
 - 3.3. PELAYANAN PERPUSTAKAAN
 - 3.4. PAMERAN / SEMINAR / WORKSHOP
 - 3.5. PROMOSI PERPUSTAKAAN
- 4. BAGIAN PROTOKOL
 - 4.1. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN TAMU DELEGASI PARLEMEN LUAR NEGERI YANG AKAN MENGUNJUNGI INDONESIA SEBAGAI TAMU RESMI PIMPINAN DPR RI & BKSAP DI JAKARTA
 - 4.2. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN TAMU DELEGASI PARLEMEN LUAR NEGERI YANG AKAN MENGUNJUNGI INDONESIA SEBAGAI TAMU RESMI PIMPINAN DPR & BKSAP DI DAERAH
 - 4.3. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN TAMU DELEGASI SEKRETARIAT PARLEMEN LUAR NEGERI YANG AKAN MENGUNJUNGI INDONESIA SEBAGAI TAMU RESMI SEKRETARIAT DPR RI DI JAKARTA
 - 4.4. PENGURUSAN VIP ROOM
 - 4.5. PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN PELAYANAN PROTOKOL DPR
 - 4.6. PENDAMPINGAN KEGIATAN PIMPINAN DPR RI
 - 4.7. PENYELENGGARAAN SUPERVISI KEGIATAN PROTOKOLER DI ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD)

- 4.8. RAPAT PARIPURNA DPR DI PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RAPBN TAHUN ANGGARAN 2022
- 4.9. SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI DALAM RANGKA HUT RI TANGGAL 16 AGUSTUS 2021
- 4.10. RAPAT PARIPURNA HUT DPR RI
- 4.11. PELANTIKAN ANGGOTA DPR RI DAN PEJABAT SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
- 4.12. KEGIATAN PROTOKOLER LAINNYA

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

- 1. BAGIAN ARSIP
- 2. BAGIAN PERPUSTAKAAN
- 3. BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM
- 4. BAGIAN PROTOKOL

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka disusunlah Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja pencapaian sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun secara berjenjang dari 4 (empat) bagian di lingkungan Biro Protokol dan Humas dengan cara membandingkan rencana/target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan capaian target pada akhir tahun 2021, dengan tetap mengacu pada Renstra Deputi Persidangan Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

LKj Biro Protokol dan Humas ini disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggungjawab, prioritas, dan manfaat bagi DPR RI maupun Sekretariat Jenderal DPR RI.

LKj ini disusun rutin setiap tahun dan disampaikan pada akhir tahun anggaran. LKj ini selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, juga dapat dijadikan bahan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengambil keputusan, utamanya dalam upaya peningkatan penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan Biro Protokol dan Humas dengan menerapkan beberapa ketentuan tersebut. Biro Protokol dan Humas telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Biro Protokol dan Humas yang baik.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan Biro Protokol dan Humas yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien, efektif, transparan dan responsif guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

LKj Biro Protokol Tahun 2021 disusun sebagai bentuk kewajiban Biro Protokol dan Humas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 sebagai perbaikan kinerja Biro Protokol dan Humas di tahun 2022.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia; bahwa Biro Protokol dan Humas yang semula berada di bawah Deputy Administrasi yang terdiri dari 2 (dua) bagian, saat ini berada di bawah Deputy Persidangan dengan membawahi 4 (empat) bagian.

Biro Protokol dan Humas mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan.

Adapun struktur organisasi Biro Protokol dan Humas terdiri dari:



Biro Protokol dan Humas dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Biro Protokol dan Humas (Eselon II) yang membawahi 4 (empat) orang Eselon III, 6 (enam) orang Eselon IV dan 141 (seratus empat puluh satu) pegawai dan Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu:

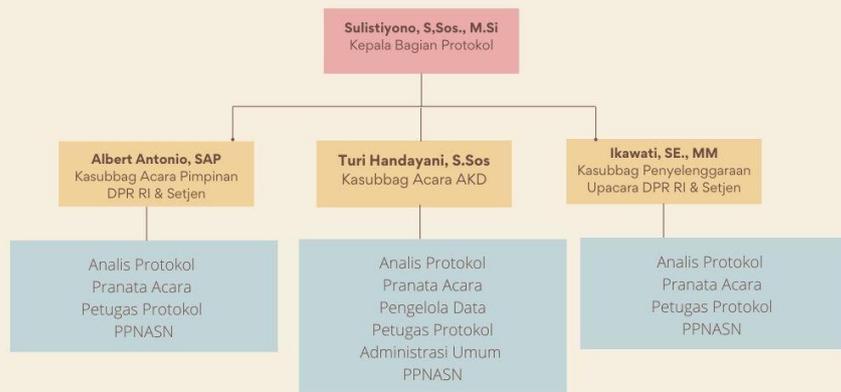
1. Bagian Arsip;
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum;
3. Bagian Perpustakaan;
4. Bagian Protokol.



Struktur Organisasi Bagian Perpustakaan



Struktur Organisasi Bagian Protokol



C. Tugas dan Fungsi

DPR memiliki fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan, dimana Anggota DPR Sebagai wakil rakyat wajib melaksanakan fungsi representasi dengan baik. Dengan demikian Anggota DPR wajib melaksanakan kegiatannya untuk menyerap, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat, sehingga Anggota DPR semakin dekat dengan Rakyat dan Konstituen di dalam daerah pemilihannya. Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Biro Protokol dan Humas di dalam melaksanakan kegiatan keprotokolanan, kehumasan, kearsipan dan keperpustakaan dalam mendukung Anggota DPR sebagai Pejabat Negara yang memiliki hak keprotokolanan dan keahlian untuk melaksanakan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Protokol dan Humas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Protokol dan Humas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan dan kehumasan;
3. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara dan upacara DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
4. Pelaksanaan dukungan kehumasan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal;
5. Pelaksanaan dukungan pengelolaan museum DPR RI;
6. Pelaksanaan dukungan pengelolaan arsip;
7. Pelaksanaan dukungan pengelolaan perpustakaan;
8. Dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang humas, museum, arsip dan perpustakaan;
9. Penyusunan laporan kinerja Biro Protokol dan Humas;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Adapun Biro Protokol dan Humas membawahi 4 (empat) bagian yang memiliki tugas fungsi sebagai berikut:

C.1. Bagian Arsip

Bagian Arsip melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan kearsipan Dewan Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya Bagian Arsip menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Arsip;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di Bidang kearsipan;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;
- d. Pelaksanaan Tata Usaha Bagian Arsip; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan Humas.

C.2. Bagian Humas dan Pengelolaan Museum

Bagian Humas dan Pengelolaan Museum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat ke kompleks DPR RI, penyaluran delegasi masyarakat, promosi, diseminasi dan edukasi publik, serta pengelolaan Museum DPR RI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Humas dan Pengelolaan Museum;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang kehumasan dan pengelolaan museum;
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan promosi, diseminasi dan edukasi publik;
- e. Pembinaan dan pengelolaan kehumasan;

- f. Pengelolaan Museum DPR RI;
- g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan Humas.

C.3. Bagian Perpustakaan

Bagian Perpustakaan bertugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang Perpustakaan;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem perpustakaan;
- c. Pembinaan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem perpustakaan;
- e. Pelaksanaan tata usaha Bagian Perpustakaan, dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

C.4. Bagian Protokol

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara dan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal

Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Protokol;
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan;
- c. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan dukungan keprotokolan di bandara;
- d. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
- f. Pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

D. Permasalahan Strategis

Di masa Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini berdampak pada seluruh pelaksanaan layanan di lingkungan Biro Protokol dan Humas, yakni sebagai berikut:

1. Layanan Arsip

Hasil nilai Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2021 adalah 73,08 (kategori sangat baik). Nilai tersebut seakan-akan menggambarkan terdapat penurunan kualitas tata kelola arsip DPR karena pada tahun sebelumnya mendapat predikat A (85,00) kategori memuaskan. Sebetulnya tidak demikian karena hal sama juga terjadi pada semua K/L dimana indikator dan parameter penilaian kearsipan yang digunakan berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 ANRI menggunakan parameter salah satunya adalah tersedianya regulasi kearsipan pada setiap K/L sedangkan untuk tahun 2021, unsur dan parameter yang digunakan adalah implementasi dari regulasi dan dilaksanakannya evaluasi tata kelola arsip internal K/L yang dapat dilihat dari adanya kegiatan pengawasan kearsipan internal. Adapun kategori penilaian dalam pengawasan kearsipan tahun 2021 yaitu untuk penilaian pengawasan internal 40% dan penilaian untuk pengawasan eksternal 60% yang dinilai oleh Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis yaitu: Penciptaan arsip, pemberkasan dan penataan arsip aktif, program arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, layanan dan akses arsip aktif, dan pemindahan arsip inaktif;
2. Aspek pengawasan SDM Kearsipan terdiri atas arsiparis yang memiliki kedudukan hukum dan kewenangan; kompetensi; dan pengangkatan dan pembinaan karier;
3. Aspek pengawasan prasarana dan sarana kearsipan yang memadai.

Untuk pengawasan internal nilainya **kurang** hal ini disebabkan karena unit pengolah belum menerapkan 4 pedoman kearsipan yang sudah berlaku karena kurang tersosialisasikannya peraturan-peraturan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan terbatasnya jumlah arsiparis dan pengelola arsip pada unit pengolah maupun unit kearsipan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Bagian Arsip terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional arsiparis, staf pengadministrasi umum, dan PPNASN. Saat ini, empat arsiparis telah meningkatkan kompetensinya dengan menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu. Bagian Arsip telah merekrut PPNASN dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, yakni 4 orang dari Diploma 3 Kearsipan dan 1 orang dari S1 Komunikasi sebagai staff Tata usaha.

Sarana dan Prasarana

Bagian Arsip sebagai unit kearsipan telah memiliki record center namun belum sesuai dengan kriteria ruang penyimpanan arsip dengan sarana perlindungan dan pencegahan yang berupa pintu darurat. Bahwa saat ini ruang yang tersedia masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah arsip yang tercipta dari kegiatan sebagai sebuah Lembaga Negara. Selain itu, ruang penyimpanan arsip yang tersedia saat ini berada di bawah tanah (basement) yang rentan dengan banjir, sulitnya akses penyelamatan arsip/dokumen apabila terjadi bencana kebakaran. Meskipun saat ini

tren arsip digital sudah menjadi sebuah keharusan, namun Bagian Arsip masih belum mendapatkan penambahan fasilitas penyimpanan data dengan kapasitas memadai, sedangkan data yang harus disimpan tidak hanya naskah digital tetapi juga termasuk video rekaman rapat-rapat Dewan yang harus dilestarikan sebagai sebuah memori perjalanan bangsa.

Anggaran dan Kinerja

Terdapat perubahan dalam realisasi anggaran 2021, banyak dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan segala jenis kegiatan Bagian Arsip seperti mengikuti workshop kearsipan dan penyusunan tim pengawasan kearsipan internal sekretariat jenderal DPR RI

2. Layanan Kehumasan dan Pengelolaan Museum

Sejak di masa Pandemi Covid-19, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum melaksanakan layanan penerimaan tamu edukasi parlemen dan tamu museum secara virtual, sedangkan tamu kunjungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya Surat Bersama oleh Sekretaris Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI tentang Penangguhan Penerimaan Tamu sejak Pandemi Covid-19.

Adapun beberapa permasalahan strategis dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, yaitu:

- Penerimaan Tamu Edukasi Parlemen dilaksanakan rutin secara daring;
- Kegiatan Parlemen Remaja dilaksanakan secara daring tanpa mengurangi esensi materi kegiatan;
- Kegiatan Parlemen Kampus dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat universitas yang bersangkutan;
- Anggaran honor narasumber dapat dimaksimalkan dengan melibatkan narasumber dari luar Sekretariat Jenderal DPR RI untuk seluruh kegiatan kehumasan;
- Melakukan revisi dan optimalisasi anggaran dari kegiatan yang sekiranya terdapat pembatasan dan tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi.

3. Layanan Perpustakaan

Kendala yang dihadapi Bidang Perpustakaan saat ini yaitu adanya kesulitan dari bagian *repository* untuk mengambil data dari bagian-bagian terkait. Misalnya produk dari Pusat Penelitian, Pusat Perundang-undangan (*Legal Drafter*), Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Bidang Perpustakaan berharap dapat menjadi **one stop service berkaitan dengan publikasi, literatur dan pustaka di DPR**. Perpustakaan DPR selaku pengelola Repositori DPR RI saat ini masih kesulitan dalam bekerjasama dengan unit kerja lain agar seluruh karya DPR RI dimasukkan dalam Repositori DPR RI. Untuk itu, perlu strategi khusus agar Repositori DPR RI dapat optimal dalam pengumpulan dan pemanfaatan karya-karya intelektual DPR RI.

Perpustakaan DPR RI terbuka untuk umum. Publik bisa membaca koleksi yang ada di Perpustakaan DPR RI namun tidak bisa melakukan peminjaman. Harapannya, layanan perpustakaan ini diketahui masyarakat umum. Masyarakat juga membutuhkan banyak referensi, misalkan yang sedang melakukan penelitian, seperti mahasiswa, peneliti, jurnalis, bahkan pustakawan.

Saat ini Perpustakaan DPR RI sedang melakukan penjajakan berkaitan dengan alih media pustaka langka atau kuno dengan bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI agar tidak terjadi duplikasi dan kualitas alih media sesuai standar nasional.

Perpustakaan DPR RI saat ini terdiri dari 3 (tiga) lantai. Lantai 1 (satu) untuk surat kabar dan bacaan ringan, lantai 2 (dua) koleksi umum, dan lantai 3 (tiga) *research library*.

Perpustakaan DPR RI saat ini mulai menjajaki untuk kerja sama dengan Perpustakaan DPRD dan lembaga informasi untuk memudahkan akses dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi, sehingga semua bisa diakses dari Senayan.

4. Layanan Protokol

- a. Pandemi COVID-19 tahun 2021 berdampak pada pelaksanaan layanan keprotokolan, sebagaimana pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2021 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut terjadi perubahan terkait undangan yang hadir fisik dan virtual sehingga terjadi pula perubahan tata tempat pimpinan sidang dan tamu undangan VIP, serta pengaturan tempat duduk Anggota DPR RI yang hadir secara fisik. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
- b. Penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdampak kepada meningkatnya perjalanan ke luar kota maupun ke luar negeri bagi anggota DPR RI dan Kesetjengan pada triwulan ke IV 2021. Meningkatnya jumlah perjalanan dinas ini menyebabkan anggaran Bagian Protokol mengalami kenaikan, sehingga memerlukan beberapa penyesuaian untuk menutupi tagihan lounge bandara. Tambahan dana untuk tagihan lounge yang didapatkan sebesar Rp 1.414.243.000,-;
- c. Adanya arahan Pimpinan Setjen DPR RI tentang pelaksanaan asesmen Bagian Protokol bagi PPNASN di akhir Triwulan IV membuat Bagian Protokol mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 285.000.000,-;
- d. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 berdampak kepada kunjungan tamu delegasi luar negeri yang datang ke Indonesia. Tidak adanya delegasi luar negeri yang datang ke Indonesia menyebabkan penyesuaian anggaran protokol dengan refocusing anggaran penerimaan tamu luar negeri sebanyak Rp 369.469.000,-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan komitmen Biro Protokol dan Humas beserta jajarannya mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui penyelenggaraan dukungan keprotokolan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan yang optimal yang didasarkan pada penjabarannya dari kondisi internal dan eksternal dengan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI. Dimana didalamnya terdapat Arah kebijakan DPR RI atas Tata Kelola kelembagaan DPR RI terkait Perumusan kebijakan internal dan pengawasan pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, dengan strategi merumuskan dan/atau mengawasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja sebagai penerima amanah kepada atasannya dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Renstra, oleh karena itu Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran, indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun melalui kegiatan dan anggaran yang disetujui pada tahun berjalan.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Biro Protokol dan Humas merupakan pernyataan komitmen Biro Protokol dan Humas beserta jajarannya yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Biro Protokol dan Humas berisikan penugasan dari Deputi Persidangan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah selaras dengan Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari rencana strategi Biro Protokol dan Humas untuk mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan dalam sasaran kerja yang akan dicapai, sesuai Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 sebesar Rp. 32,896,725,000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan dan Layanan Informasi	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,30
		2. Presentase Jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan	10%
		3. Peningkatan kualitas layanan Informasi Publik	Menuju Informatif
		4. Jumlah layanan Kehumasan dan Museum	50 penerimaan intansi kunjungan Tamu Edukasi secara virtual #dirumahaja
		5. Jumlah kunjungan ke Perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	8.000
		6. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,20
		7. Kualitas Pengelolaan Arsip	A
		8. Persentase realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas	9,25%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Biro Protokol dan Humas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Untuk membuktikan akuntabilitas kinerja, maka perlu dilakukan dengan pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Biro Protokol dan Humas.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, membandingkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja Biro Protokol dan Humas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran, sehingga menggambarkan penilaian capaian kinerja sesuai dengan realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Biro Protokol dan Humas.

Tabel berikut memperlihatkan target kinerja, realisasi dan capaian Biro Protokol dan Humas pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan dan Layanan Informasi	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,30	<i>masih dalam proses</i>
		2. Presentase Jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan	10%	4 %
		3. Peningkatan kualitas layanan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif 96,52

		4.	Jumlah layanan Kehumasan dan Museum	50 penerimaan instansi kunjungan Tamu Edukasi secara virtual #dirumahaja	6.026 orang
		5.	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	8.000	11.658
		6.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,20	<i>masih dalam proses</i>
		7.	Kualitas Pengelolaan Arsip	A	A
		8.	Persentase realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas	92,5%	96,58%

Adapun capaian kegiatan setiap unit kerja di Biro Protokol dan Humas sebagai berikut:

1. Bagian Arsip

Bagian Arsip hadir di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang profesional, baik dan bersih yang diwujudkan dalam arah kebijakan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik berupa peningkatan layanan pengolahan dokumen kearsipan berbasis IT DPR. Adapun diwujudkan dalam strategi melakukan pengolahan data dan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi; peningkatan kapasitas penyimpanan data kearsipan berbasis teknologi informasi. Kemudian tertuang dalam target indikator kinerja program dukungan manajemen tahun 2020-2024.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik	Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50

Berkaitan dengan indikator kinerja Biro Humas dan Protokol, Bagian Arsip berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan informasi dengan menyusun beberapa regulasi yang terkait tata kelola arsip, yaitu :

No.	Regulasi	Keterangan
1.	Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas	2021
2	Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik	2021
3.	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 14 tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	2021
4.	Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Alih Media	2021
5	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis	2021

6	Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 41/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif.	2020
7	Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1641 /SEKJEN/2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif	2020

Dalam rangka mendukung system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kearsipan DPR juga telah terintegrasi dengan SRIKANDI yang menjadi salah satu tujuh lembaga yang diuji coba sehingga introprobalitas antar lembaga dapat diwujudkan.

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Bagian Arsip sebagai unit kearsipan lembaga negara memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI. Adapun penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Adapun dalam implementasi kegiatan selama tahun 2021, dilakukan sesuai dengan daur hidup arsip:

1.1. Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Kegiatan Pembinaan Kearsipan pada tahun 2021 dilaksanakan di Biro Perencanaan Keuangan, Biro Umum dan Biro Pimpinan. Adapun kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara pemaparan teoritis dan praktek langsung.

No.	Unit Kerja Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
1	TU Biro Perencanaan Keuangan	April 2021
2	Bagian Perencanaan	April 2021

3	Bagian Administrasi Keuangan	April 2021
4	Bagian Perjalanan	April 2021
5	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	April 2021
6	TU Biro Umum	April 2021
7	Bagian Persuratan dan Penyimpanan	April 2021
8	Bagian Layanan dan Pengadaan	April 2021
9	Bagian Kendaraan	April 2021
10	Bagian Pengamanan Dalam	April 2021
11	Bagian Pelayanan Kesehatan	April 2021
12	Bagian Set Ketua	April 2021
13	Bagian Set. Wakil Ketua	April 2021
14	Bagian TU Pimpinan SEkjen	April 2021
15	TU Biro Pimpinan	April 2021
16	Bagian Set Bamus	April 2021
17	Bagian Set Muspim	April 2021
18	Bagian TU TA dan Staf Administrasi	April 2021



Pembinaan pengelolaan Kearsipan di Bagian Muspim

1.2. Pengelolaan dan penataan arsip

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu media yang tercipta tidak hanya konvensional (kertas) tetapi beberapa media bentuk lainnya. Arsip dalam bentuk penciptaanya dibagi menjadi 3 yaitu arsip konvensional, arsip bentuk khusus atau *record in special format*, arsip digital/arsip elektronik. Secara konseptual arsip kaset, dvd, vhs, betacam merupakan arsip bentuk khusus sehingga dalam pengolahan dan penyimpanannya akan berbeda dengan arsip konvensional.

Tahapan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, adapun data yang sudah diolah adalah:

Jenis Arsip	Jumlah
Media Baru	
Mini DV	600 <i>minidivi</i>
Kaset Rekaman Suara	4880 kaset
Konvensional	771 boks



Penataan Arsip Konvensional di Pusat Arsip



Penataan Arsip kaset (media baru) di Pusat Arsip

1.3. Perawatan dan Penyelamatan Arsip

Perawatan dan penyelamatan arsip adalah usaha pengamanan arsip agar mencegah dari kerusakan sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan fisik maupun informasi pada arsip. Upaya ini dapat dilakukan secara preservasi maupun restorasi guna memperpanjang usia arsip.

1.3.1. Perawatan arsip media baru

Jenis Arsip	Jumlah
Kaset	4000 Kaset
Kaset Video Mini DV	2000 Kaset
CD/DVD	4000 Kaset

1.3.2. Perawatan Arsip Konvensional

Kegiatan perawatan arsip konvensional menggunakan metode fumigasi salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Arsip

Tahun anggaran 2021, kegiatan fumigasi merupakan kegiatan pembasmian hama yang dapat merusak fisik arsip konvensional dan arsip bentuk khusus. Adapun kegiatan fumigasi dilaksanakan pada triwulan 2

Gedung	Ruang	Jumlah Volume (m ³)
Nusantara III Lt. Basement		
R.1 (konvensional)	Penyimpanan Arsip	215,982 m ³
R.2 (konvensional)	Penyimpanan Arsip	130,127 m ³
R.3 (konvensional)	Penyimpanan Arsip RUU	216,057 m ³
R.4 (konvensional)	Penyimpanan Arsip <i>Personal File</i>	179,829 m ³

1.3.3. Digitalisasi/alih media

Alih media merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya. Alih media direalisasikan dalam bentuk kegiatan transfer rekaman suara ke media digital. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam ketersediaan arsip DPR RI yang autentik dan terpercaya. Dalam hal ini penggunaan pihak ketiga bertujuan untuk optimalisasi penyerapan anggaran serta membantu dalam meningkatkan efektifitas kinerja arsiparis.

Jenis Arsip	Jumlah
Transfer Rekaman Suara ke Digital	4880 kaset
Alih Media Kaset Video Mini DV Digital	600 kaset

1.4. Pengawasan Kearsipan

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Tim Pengawas Kearsipan Internal melaksanakan audit kearsipan internal di 18 objek pengawasan.

Yang mendapatkan hasil pengawasan internal dengan predikat baik adalah Inspektorat Utama, Biro Persidangan I dan Biro Hukum.



Pemberian Penghargaan Pengelolaan arsip terbaik antar unit pengolah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

1.5. Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan

a. Pemindahan Arsip

Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan (Bagian Arsip) yang sudah habis masa retensi aktifnya di unit kerja akan dipindahkan dengan menyertakan Daftar Arsip. Pemindahan dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bagian Arsip menerima pemindahan dalam kurun waktu 2021 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Sekretariat Komisi I	34 berkas
2	Bagian Sekretariat Komisi II	7 berkas
3	Bagian Sekretariat Komisi III	183 berkas

4	Bagian Sekretariat Komisi XI	4200 kaset
5	Bagian Persuratan dan Penyimpanan	777 berkas
6	Bagian Set Wakil Ketua DPR	150 berkas
7	Bagian Musyawarah Pimpinan	56 berkas
8	Bagian Perjalanan	14.439 berkas
9	Bagaian Set. Kerjasama Bilateral	43 berkas
10	Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi	148 berkas
11	Bagian Administrasi Keuangan	852 berkas
12	Bagian Set. Badan Musyawarah	28 berkas dan 415 kaset
13	Bagian Set. Badan Anggaran	219 berkas
14	TV parlemen	7.895 kaset minidv



Pemindahan arsip perjalanan sebanyak 14.439 berkas ke Bagian Arsip (Unit Kearsipan)

b. Penyerahan Arsip

Bagian Arsip melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis yang tercipta dari hasil pekerjaan/kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Nomor: B/15782/KA.07.03/11/2021 Nomor: KN.00.04/362/2021 kepada Arsip Nasional RI yang dilaksanakan rutin pada bulan November setiap tahunnya. Dengan pertimbangan kondisi arsip memiliki nilai guna kesejarahan; telah habis masa retensinya; dan berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) pencipta arsip. Adapun jumlah arsip yang diserahkan ke ANRI yaitu arsip konvensional 914 berkas (38 boks besar= 7,6 meter linier) dan arsip kaset berjumlah 415 kaset VHS.



Penandatanganan Penyerahan arsip DPR RI oleh Wakil Ketua BURT kepada Kepala Arsip Nasional RI

c. Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis masa retensinya, yang tidak bernilai guna dan berketerangan musnah. Pada tahun 2021 Sekretariat Jenderal DPR RI memusnahkan arsip *personal file* Tenaga Ahli anggota periode 2014-2015 Bagian Manajemen SDM Non ASN sebanyak 2870 berkas.

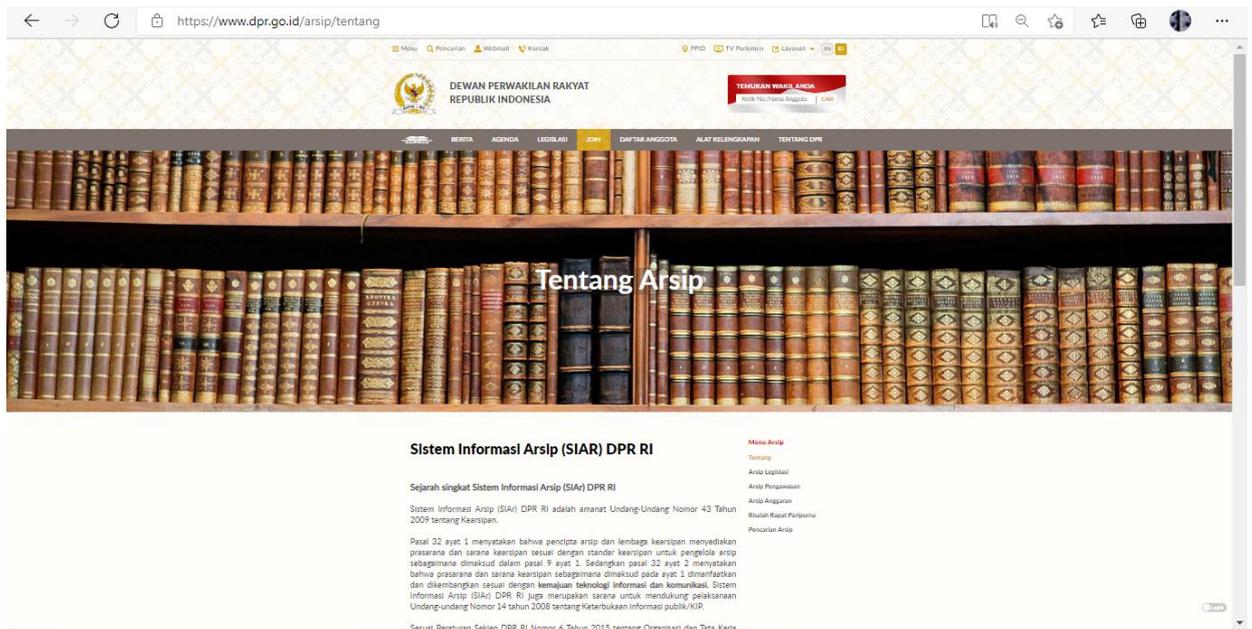


Proses pencacahan arsip personal file Tenaga Ahli anggota periode 2014-2019

1.6. Pelayanan Kearsipan

Pelaksanaan pelayanan arsip dinamis aktif kepada pengguna, arsip yang dilayanan berupa Arsip pembahasan RUU (Fungsi Legislasi); Arsip pengawasan DPR RI (Fungsi Pengawasan); arsip anggaran DPR RI (Fungsi Anggaran) melalui media.

Bagian Arsip Biro Humas dan Protokol Sekretariat DPR RI telah menampilkan menu Sistem Informasi Arsip DPR RI dalam Website <https://www.dpr.go.id/arsip>, dalam hal ini sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI berbasis teknologi informasi dalam mendukung kegiatan layanan informasi yang bersumber dari arsip kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.



Pada tahun 2021 Bagian Arsip melayani permintaan data baik secara internal maupun eksternal (melalui PPID) sebanyak 82 permintaan. Adanya penurunan jumlah permintaan data tersebut disebabkan penggunaan aplikasi SIAR yang sudah maksimal. Akan tetapi aplikasi SIAR ini belum bisa menghitung jumlah yang mengakses dan men-download data yang ada. Sehingga Bagian Arsip tidak mengetahui berapa banyak jumlah pengguna aplikasi SIAR setiap harinya.



Pelayanan Kearsipan pemohon data internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

Bagian Arsip selain memberikan pelayanan data juga menyelenggarakan pameran kearsipan virtual yang tahun 2021 ini bertajuk Penyelamatan dan Pelestarian Arsip DPR RI: Ada Bukti dan Sejarah Kinerja Dewan di Kearsipan DPR RI yang mengangkat tema tentang isu kesehatan nasional. Dalam pameran kearsipan virtual ini, dipresentasikan bagaimana kinerja anggota Dewan dalam menyusun rancangan Undang-undang Kesehatan.



Pameran virtual Arsip DPR RI Kearsipan DPR RI dapat diakses melalui halaman website <https://www.dpr.go.id/PameranVirtualArsip>





Gambar 2 Tampilan awal pameran virtual arsip DPR RI yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI

2. Bagian Humas dan Pengelolaan Museum

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 Persekjen DPR RI No.6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat ke kompleks DPR RI, penyaluran delegasi masyarakat, promosi, diseminasi dan edukasi publik, serta pengelolaan Museum DPR RI.

Adapun rangkaian capaian kinerja kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

2.1. PPID

Menindaklanjuti Persekjen DPR RI No.6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal DPR RI mengeluarkan Surat Keputusan nomor 891/Sekjen/2021, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI, menunjuk Kepala Biro Protokol dan Humas sebagai PPID Utama Setjen DPR RI yang baru. Dalam Surat Keputusan tersebut juga menetapkan alat kelengkapan PPID diantaranya Tim Pertimbangan yakni pejabat Eselon I dan II Setjen DPR RI, Wakil PPID Utama yakni Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum dibantu Kepala Bagian Arsip serta Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum, juga PPID Pelaksana yakni pejabat eselon III di lingkungan Setjen DPR RI.

Dalam rangka memberikan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah), berbagai inovasi sebagai upaya peningkatan terus dilakukan, seperti penyediaan informasi yang lebih *user friendly* melalui pengembangan beberapa aplikasi, mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai layanan berbasis *online*, dan juga penetapan kebijakan untuk mendukung penyediaan layanan jarak jauh dengan memperbaharui Standar Operasional Kerja (SOP). Beberapa SOP yang telah diperbarui pada tahun 2021 diantaranya, SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi, SOP Penetapan Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Atas Informasi Yang Dikecualikan, dan SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.

PPID Sekretariat Jenderal DPR RI sepanjang tahun 2021 melayani pendaftaran akun pemohon informasi baru yang tercatat sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) pemohon terdiri dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) pemohon perorangan dan 5 (lima) pemohon badan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Pemohon Perorangan	Pemohon Badan Hukum	Total Keseluruhan
Januari	22	0	22
Februari	23	0	23
Maret	31	0	31
April	36	0	36
Mei	32	0	32
Juni	47	0	47
Juli	20	0	20
Agustus	25	0	25
September	38	1	39
Oktober	31	1	32
November	30	1	31
Desember	25	2	27
Total	355	5	360

Pemohon (Baru) Informasi Publik

Pada tahun 2021 tercatat 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) permohonan informasi dan masih didominasi oleh permohonan atas risalah dan naskah akademik pembahasan suatu rancangan undang-undang. Meskipun demikian, cukup banyak permohonan informasi yang membutuhkan data lain-lain seperti rekaman sidang, daftar inventarisasi masalah, hingga profil anggota dewan baik berdasarkan jenis kelamin, latar belakang Pendidikan maupun tugasnya dalam Alat Kelengkapan Dewan. Data permohonan dan jenis data yang diminta dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Permintaan Data			
		Risalah	Naskah Akademik	Laporan Singkat	Lain-Lain
Januari	79	46	9	7	17
Februari	85	41	34	0	10
Maret	60	29	19	2	10
April	147	62	51	17	17
Mei	70	37	20	0	13
Juni	120	67	42	1	10
Juli	51	17	17	12	5
Agustus	48	21	13	3	11
September	96	48	34	3	11
Oktober	62	22	25	1	14
November	70	31	17	5	17
Desember	66	35	14	9	8
Total	954	456	295	60	143

Permohonan dan Jenis Data yang Diminta Publik

Sebagian besar permohonan informasi kepada PPID Setjen DPR RI diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 hari sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara umum informasi yang diminta oleh pemohon telah tersedia, baik di website resmi maupun media penyimpanan data, sehingga permohonan dapat diselesaikan dengan segera. Akan tetapi ada beberapa permohonan informasi yang merupakan data aktif, yang memerlukan waktu pendokumentasian dan berada dalam penguasaan unit kerja pemilik informasi, sehingga permohonan baru dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Data waktu penyelesaian permohonan informasi dapat dilihat melalui tabel berikut :

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Penyelesaian		
		<10hr	10hr < n <17hr	>17hr
Januari	79	72	1	6
Februari	85	85	0	0
Maret	60	57	1	2
April	147	144	3	0
Mei	70	67	3	0
Juni	120	110	5	5
Juli	51	44	0	7
Agustus	48	45	3	0
September	96	83	12	1
Oktober	62	62	0	0
November	70	60	7	3
Desember	66	59	6	1
Total	954	888	41	25

Sepanjang tahun 2021, tidak ada permohonan informasi yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Setjen DPR RI. Dari 954 permohonan seluruhnya diselesaikan dan tidak ada permohonan yang dibatalkan oleh pemohon. Selama periode Januari hingga Desember 2021, PPID Setjen DPR RI tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon informasi publik. Sehingga PPID Setjen DPR RI juga tidak menerima gugatan atas sengketa informasi.

2.2. Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah) maka, PPID Setjen DPR RI juga turut mengevaluasi kinerja petugas dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menjadi pemohon data kepada PPID Setjen DPR RI dengan jumlah responden 75 responden. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap 8 unsur pelayanan yang ditetapkan dan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dengan pelayanan yang ada. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi *Google Form*. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Memuaskan
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Memuaskan

Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,125. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	PERTANYAAN (UNSUR PELAYANAN)	NILAI SKM	MUTU
1.	Pertanyaan 1 (Kemudahan Mekanisme, Sistem, dan Prosedur)	3,33	A
2.	Pertanyaan 2 (Kemudahan Persyaratan)	3,33	A
3.	Pertanyaan 3 (Waktu Penyelesaian)	3,40	A
4.	Pertanyaan 4 (Kesesuaian Produk yang Diberikan)	3,16	B
5.	Pertanyaan 5 (Kompetensi Petugas/Kejelasan dalam memberikan pelayanan)	3,31	A
6.	Pertanyaan 6 (Kompetensi Petugas/Kecepatan dalam merespon pemohon informasi)	3,13	B
7.	Pertanyaan 7 (Perilaku Petugas)	3,42	A
8.	Pertanyaan 8 (Sarana dan Prasarana/Tampilan Website)	3,32	A

Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,33 \times 0,125) + (3,33 \times 0,125) + (3,40 \times 0,125) + (3,16 \times 0,125) + (3,31 \times 0,125) + (3,13 \times 0,125) + (3,42 \times 0,125) + (3,32 \times 0,125) = \text{Nilai Survei adalah } \mathbf{3,30}$$

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Setjen DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = $3,30 \times 25 = \mathbf{82,6}$
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja pelayanan informasi publik adalah **Sangat Memuaskan**

Enam unsur di atas, merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, dan terus diupayakan untuk meningkatkan nilai SKM di tahun-tahun mendatang. Sedangkan unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan karena secara mutu layanan masih bernilai "B" adalah sebagai berikut:

UNSUR PELAYANAN	NILAI SKM	MUTU
Kesesuaian Produk yang Diberikan	3,16	B
Kompetensi Petugas/Kecepatan dalam merespon pemohon informasi	3,13	B

Dari kuesioner yang diisi oleh responden terdapat kolom komentar untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan kinerja pelayanan informasi publik PPID Setjen DPR RI. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian mengingat menjadi isu yang sering muncul dalam kolom komentar tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Kecepatan layanan permohonan dan untuk dapat ditingkatkan;
- b. Dokumen yang didapat tidak sesuai dengan yang diminta;
- c. Kecepatan registrasi pemohon untuk dapat dipercepat;
- d. Perbaikan Navigasi dalam pencarian informasi.

Selain beberapa kritik dan masukan di atas, menu “*chat admin*” yang memanfaatkan aplikasi percakapan *whatsapp*, mendapatkan banyak apresiasi karena bisa menjadi solusi Ketika ada kendala layanan informasi melalui website *ppid.dpr.go.id*.

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan PPID Setjen DPR RI dirasa sangat memuaskan oleh para pemohon informasi. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik yang diperoleh sebesar 82,6 dari 8 (delapan) unsur pelayanan yang disurvei. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata indeks 3,30. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan PPID Setjen DPR RI sangat memuaskan.

2.3. Edukasi Parlemen

Berdasarkan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, salah satu tugas Bagian Humas dan Pengelolaan Museum adalah menerima kunjungan masyarakat dan edukasi publik. Guna melaksanakan tugas tersebut Bagian Humas dan Pengelolaan Museum menjalankan program Edukasi Parlemen yang bertujuan memberikan edukasi kepada publik baik itu siswa, mahasiswa organisasi maupun kelompok masyarakat terkait pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kegiatan Edukasi Parlemen mencakup diskusi, observasi dan dilanjutkan dengan observasi dengan mengunjungi Museum DPR RI dan Ruang Sidang Paripurna 1 yang di pandu oleh Pamong Budaya Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pada dasarnya kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan dua cara, yakni secara luring (datang langsung) dan daring (secara virtual). Namun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 kegiatan Edukasi Parlemen tahun 2021 ini seluruhnya diadakan secara daring melalui Zoom Meeting yang juga disebut Edukasi Parlemen **#dirumahaja**. Selama tahun 2021 Kegiatan Edukasi Parlemen **#dirumahaja** telah

dikunjungi oleh 6.026 Orang dari berbagai Sekolah, dan Universitas dengan rincian sebagai berikut:

- TK/PAUD : 0 Orang
- Sekolah Dasar : 727 Orang
- SMP : 825 Orang
- SMA : 1.268 Orang
- Universitas : 3.206 Orang

**KUNJUNGAN VIRTUAL
EDUKASI PARLEMEN**



**KUNJUNGAN VIRTUAL
EDUKASI PARLEMEN**



**KUNJUNGAN VIRTUAL
EDUKASI PARLEMEN**



**KUNJUNGAN VIRTUAL
EDUKASI PARLEMEN**



Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan Kegiatan Edukasi Parlemen **#dirumahaja** yang paling banyak dikunjungi yaitu dari kalangan Mahasiswa/Universitas dengan jumlah 3.206 Orang. Dikarenakan disaat pandemi Covid-19 ini Mahasiswa banyak merencanakan kegiatan-kegiatan salah satunya dengan kunjungan ke Pemerintahan atau Lembaga secara virtual dalam rangka program kerja tahunannya.

2.4. Museum

2.4.1. Kunjungan Fisik Museum

Keadaan pandemi Covid-19 berpengaruh pada jumlah kunjungan fisik ke Museum DPR RI. Selama tahun 2021, Museum DPR RI membuka kunjungan museum secara terbatas dan tentatif mengikuti kondisi pandemi sesuai aturan yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam membuka operasional kunjungan, Museum DPR RI menetapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak antar pengunjung dan menggunakan sanitasi tangan. Jumlah kunjungan Museum DPR RI pada tahun 2021 berjumlah 622 pengunjung dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Orang
1	Januari	0
2	Februari	2
3	Maret	0
4	April	15
5	Mei	0
6	Juni	15
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	45
10	Oktober	53
11	November	212
12	Desember	280
Jumlah Keseluruhan		622

Dari data diatas, dapat terlihat nihilnya kunjungan pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, dan Agustus. Nihilnya kunjungan terjadi karena peningkatan kasus penularan Covid-19 di awal tahun 2021. Begitu pula yang terjadi di pertengahan tahun karena pada periode tersebut terjadi Gelombang Kedua Covid-19 akibat merebaknya varian Delta di Indonesia.

Mulai bulan September hingga Desember 2021, terjadi peningkatan jumlah kunjungan seiring membaiknya kondisi pasca Gelombang Kedua. Jumlah kunjungan mencapai lebih dari 100 karena terdapat kunjungan terbatas dari delegasi Anggota DPR RI yang rutin dilakukan setiap minggu.



Kunjungan rombongan dari sekolah dan kampus yang menjadi kunjungan mayoritas sebelum pandemi, masih nihil. Hal ini karena sekolah dan kampus masih menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan belum dibukanya izin menerima kunjungan rombongan oleh Setjen DPR RI. Mayoritas pengunjung Museum DPR RI di tahun 2021 adalah delegasi Anggota DPR RI, mahasiswa program Magang Merdeka di DPR RI, alumnus Parlemen Remaja 2021, pegawai K/L yang sedang dinas di DPR RI, serta pegawai internal di kawasan Kompleks MPR/DPR/DPD RI.

Jumlah kunjungan di tahun 2021 sangat menurun drastis bila dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 10.208 pengunjung. Perbandingan selisih jumlah kunjungan pada tahun 2020-2021, mencapai -9.586 pengunjung atau menurun 95,86%.



2.4.2. Virtual Museum

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi tentang sejarah parlemen terutama untuk anak-anak sekolah, pada awal masa pandemi Covid-19 Museum DPR menyelenggarakan layanan virtual museum dengan menggunakan Google Poly di bit.ly/virtualmuseumdpr. Namun, karena

layanan ini tutup tanggal 30 Juni diperlukan situs pengganti yang bisa menghadirkan museum ke pengunjung melalui media virtual. Pembuatan tur virtual museum dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu selama bulan Juni 2021.



Pengumpulan data pendukung untuk membuat virtual museum ini tidak begitu sulit. Untuk data baru yang perlu ditambahkan adalah *voice over* untuk pemanduan museum. Sementara itu, bagian yang cukup memakan waktu adalah proses stitching atau penggabungan foto 360. Alamat situs yang dipersiapkan untuk menampung aplikasi ini adalah di museum.dpr.go.id. situs ini tidak hanya menampilkan virtual museum saja, namun juga memuat informasi lainnya yang tidak bisa ditampilkan secara fisik, contohnya pameran daring. Kedepannya, akan terus ditambahkan konten berupa direktori koleksi Museum DPR hingga Anggota DPR dari masa ke masa. Layanan ini juga mudah digunakan dengan dukungan gambar 360, deskripsi titik informasi, hingga kemampuan untuk pemutaran rekaman audio dan video.

2.4.3. Seminar Museum

Dalam peringatan Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, International Council of Museum (ICOM) membuat tema tentang museum di masa depan dengan bertitik fokus pada pemulihan dan pengemasan ulang museum. Sebagai wujud partisipasi dalam peringatan tersebut, Museum DPR RI mengadakan kegiatan Seminar bertajuk “*Masa Depan Museum Setelah Pandemi: Memulihkan dan Mengemas Ulang Museum*”. Seminar dilakukan secara *hybrid*, yaitu daring maupun luring. Seminar diadakan pada hari Rabu, 19 Mei 2021 pukul 10.00-12.00 WIB.

Penyelenggaraan secara daring menggunakan media Zoom Meeting yang diikuti peserta di luar DPR RI sejumlah 356 peserta yang terdiri dari tenaga dan aktivis museum, civitas akademika (dosen dan mahasiswa rumpun sosial humaniora), warga sekolah (guru dan murid), serta masyarakat umum. Sedangkan penyelenggaraan secara luring diadakan di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, yang diikuti oleh segenap staf Bagian Humas dan Pengelolaan Museum serta *stakeholders* dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk menambah semarak kegiatan seminar, Museum DPR RI membagikan 100 souvenir berupa *pouch* yang dibagikan kepada 100 pendaftar pertama.



Berikut adalah Pembicara Kunci, Narasumber, beserta Moderator, yang mengisi acara seminar:

1. Pembicara Kunci:
 - Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
(Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi X DPR RI)
2. Narasumber:
 - Sadiah Boonstra, Ph.D.
(Praktisi Museum & Kurator Independen dari PT Culture Lab Consultancy)
 - Jeong-ok Jeon, B.F.A, M.F.A.
(Dosen Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta)

- Yudhi Soerjoatmodjo
(Pendiri Dapoer Dongeng & Produser Seni di Museum Nasional)
3. Moderator:
Karina Aulia Mintahir (Puteri Duta Museum DKI Jakarta 2019)

Saran dan Rekomendasi

1. Bila kondisi pandemi terkendali, diharapkan dapat menerima peserta dari luar secara luring.
2. Penggunaan media daring seperti Zoom Meeting dalam kegiatan publik Museum DPR RI, perlu dilanjutkan karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

2.4.4. Pameran Museum

Pada masa pandemi Covid-19 Museum DPR mengedepankan aktivitas digital dengan mengadakan pameran temporer berbentuk daring. Keunggulan dari pameran berbentuk daring adalah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga fleksibel serta efisien karena dapat diakses di segala waktu dan tempat. Tema pameran daring Museum DPR RI yaitu, *"Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia"*. Salah satu tujuan pameran ini adalah untuk memperkenalkan kepada publik tentang keberadaan dan kisah KNIP sebagai lembaga parlemen pertama yang dimiliki bangsa Indonesia serta menunjukkan koleksi KNIP.



Pameran dilaksanakan secara daring di situs web: www.museum.dpr.go.id/pameranknip dan dilaksanakan selama kurun waktu 31 hari pada tanggal 18 Oktober - 17 November 2021. Jumlah pengunjung selama pameran berjumlah 1032 pengunjung. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan, yaitu, 1000 pengunjung. Sedangkan, jumlah partisipan yang mengikuti keseluruhan empat sesi kuis yaitu 590 partisipan.

Selama waktu penyelenggaraan pameran daring, Museum DPR RI turut mengadakan beberapa kegiatan antara lain:

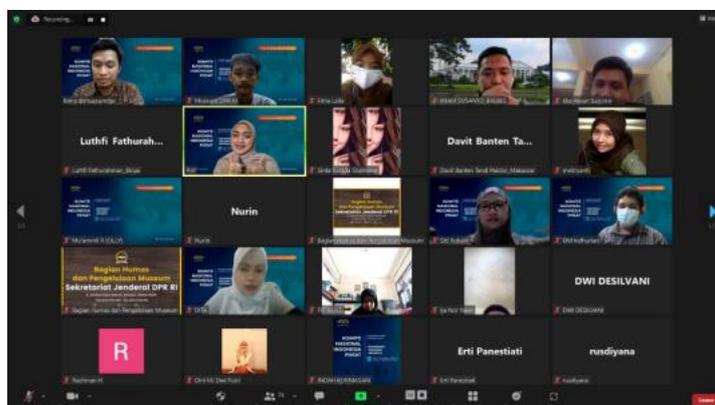
a. Gelar Wicara



Gelar Wicara dilaksanakan pada Senin, 18 Oktober 2021, jam 09.00-12.00 WIB secara daring melalui Zoom dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Museum DPR RI dan kanal lain yang bekerja sama dengan Museum DPR RI serta luring di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara dengan tema “Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia”. Terdapat 2 Narasumber yaitu Dr. Anhar Gonggong, M.A. selaku (Sejarawan) Dr. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd. selaku Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta dan dimoderator Bonnie Triyana selaku Pemimpin Redaksi Majalah Historia.ID dengan jumlah partisipan daring mencapai 199 peserta.

b. Pemanduan Daring

Dalam rangka mensosialisasikan kegiatan Pameran Daring beserta kegiatan pendukung di dalamnya, maka diadakan Pemanduan Daring secara berkala. Pemanduan berlangsung secara daring melalui Zoom pada Selasa, 9 November 2021, jam 10.00-11.30 WIB dengan jumlah partisipan 71 peserta



c. Seminar Daring

Seminar Daring menjadi acara penutup di hari terakhir penyelenggaraan Pameran Daring dengan tema “Posisi DPR RI dalam Historiografi Indonesia”. Berlangsung secara daring melalui Zoom serta, Luring di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara pada Rabu, 17 November 2021, pukul 09.00-12.00 WIB. **Pembicara Kunci pada seminar ini yaitu** Agustina Wilujeng Pramestuti selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan **Narasumber** yaitu Prof. Dr. Susanto Zuhdi (Sejarawan UI), Prof. Dr. Bambang Purwanto (Sejarawan UGM), Prof. Amelia Fauzia, Ph.D. (Sejarawan UIN Syarif Hidayatullah). Peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring berjumlah 237 orang.

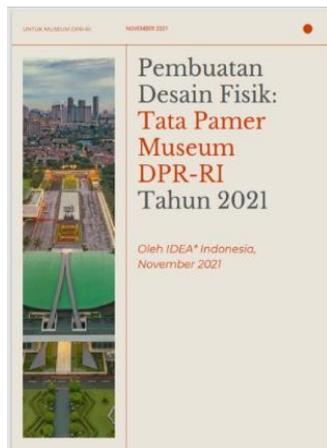


Saran dan Rekomendasi

- a. Bila kondisi pandemi terkendali, diharapkan dapat menerima peserta dari luar secara luring;
- b. Bila kondisi pandemi terkendali, diharapkan dapat mengadakan pameran secara *hybrid* (luring dan daring);
- c. Penggunaan media daring seperti Zoom Meeting dalam kegiatan publik Museum DPR RI, perlu dilanjutkan karena dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

2.4.5. Grand Design Museum

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui arah pengembangan dan pembangunan fisik dan non fisik museum yang ekstensif bagi Museum DPR-RI secara unggul dan berkelanjutan, serta efisien dan efektif melalui penguatan dan pemberdayaan kualitas serta kuantitas berbagai sumber daya baik manusia maupun non-manusia dari Museum DPR-RI. Kegiatan Pembuatan Grand Design ini dimulai pada bulan September hingga akhir bulan November 2021



Rekomendasi langkah-langkah pengembangan Museum DPR-RI:

- Pengesahan visi-misi Museum DPR RI serta restrukturisasi manajemen dimana Museum DPR RI berada di bawah payung manajemen yang sama dengan Arsip & Perpustakaan DPR-RI dan bukan Humas DPR RI.
- Rekrutmen staf profesional yang esensial untuk penyelenggaraan Museum DPR-RI dan perubahan budget agar mampu menampung lebih dari kegiatan publik Museum DPR RI.
- Melakukan Market Research untuk mengetahui target publik Museum DPR-RI
- Kebijakan koleksi yang mumpuni harus dilengkapi sebelum desain ulang pameran dapat dilakukan.
- Konservasi objek koleksi urgen dilakukan sebelum pameran publik dibuka
- Pameran Permanen I, mencakup kegiatan riset pameran, penulisan kuratorial yang ter Kontekstualisasi dengan kondisi DPR RI masa kini dan juga copywriting untuk wall text dan teks pameran lainnya dalam bentuk yang dapat dengan mudah dimengerti pengunjung.
- Pameran Permanen II, mencakup pembangunan pameran permanen, penambahan papan penunjuk ke museum, pembangunan display + pencahayaan dan juga fasilitas ramah difabel dalam pameran.
- Strategi komunikasi Museum DPR RI mengimplementasikan citra museum dalam kalender media sosial, website, dan lainnya.
- Toolkit Edukasi, mencakup optimalisasi fasilitas edukasi Museum DPR RI
- Katalogisasi dan evaluasi objek koleksi dilakukan setelah pameran guna mengkaji kelayakan objek dalam museum.
- Ruang penyimpanan dan juga studio konservasi disiapkan untuk menerima objek koleksi yang akan disimpan.
- Appraisal penting dilakukan setelah tahap katalogisasi agar nilai moneter objek koleksi dapat ditentukan dan objek koleksi dapat diasuransi
- Pendaftaran Kompleks MPR/DPR ke dalam Cagar Budaya Nasional.

2.5. Parlemen Remaja

Parlemen Remaja merupakan kegiatan pembelajaran politik kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Kegiatan ini mengajarkan tentang pentingnya berdemokrasi, sehingga diharapkan dapat memahami nilai-nilai dasar dari demokrasi di Indonesia. Parlemen Remaja tahun 2021 diselenggarakan masih dalam situasi Pandemi Covid-19, dan mengingat suksesnya diselenggarakan Parlemen Remaja 2020 secara daring maka Sekretariat Jenderal DPR RI tetap mengadakan Parlemen Remaja 2021 secara daring dengan berbagai inovasi. Sejalan dengan praktik yang dilakukan DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan kedewanan pada masa pandemi, Parlemen Remaja 2021 juga mensimulasikan beberapa kegiatan kedewanan semirip mungkin dengan suasana virtual seperti keadaan ruangan sidang yang asli.

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman berdemokrasi yang benar kepada pelajar SMU/sederajat terkait kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga legislatif
2. Peserta dapat memahami mekanisme persidangan di DPR
3. Peserta dapat memahami mekanisme pembentukan undang-undang di DPR
4. Membangun citra positif tentang parlemen
5. Mendekatkan parlemen dengan generasi muda

Parlemen remaja tahun 2021 memanfaatkan aplikasi zoom meeting, dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 13-17 September 2021 dengan mengangkat tema **“Remaja di Era Kebebasan Informasi: Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas”**. Peserta Parlemen Remaja berjumlah 131 siswa SMA sederajat mewakili 80 Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia, melalui proses seleksi yang ketat dengan mensyaratkan 3 penilaian yaitu CV; Essy dan Pembuatan Video. Antusiasme siswa peserta tergambar dari jumlah yang mengikuti seleksi pada 7-23 Agustus 2021 yaitu sejumlah 5.458 pendaftar. Sebaran calon peserta secara merata dilaksanakan melalui informasi tertulis kepada 34 Dinas Pendidikan Provinsi dan blasting email kepada 28.000 SLTA di seluruh Indonesia. Terhadap 28.000 SLTA selanjutnya dibagi dalam zonasi sesuai perwakilan daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia, yang (saat ini) berjumlah sebanyak 80 dapil. Setiap Dapil dipilih 2 (dua) orang dengan nilai terbaik di Dapil-nya. Untuk provinsi yang memiliki 10 – 12 Dapil, dipilih 1 (satu) orang.

Berikut Narasumber pada acara Parlemen Remaja 2021:

NAMA	JABATAN
Puan Maharani	Ketua DPR RI
Farah Puteri Nahlia	Anggota DPR RI
Geryantika Kurnia	Direktur Penyiaran Kominfo
Masduki	Akademisi
Helmi Yahya	Business Coach & Youtuber
Analisa Widyaningrum	Psikolog
Christophorus Taufik Siswandi	Corporate Legal Director Global TV

Nugroho Agung Prasetyo	AVP Brand Communication NET TV
Eflianty Analisa	Plt. Kepala Puslitbang LPP TVRI
Irsal Ambia	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Indra Iskandar	Sekretaris Jenderal DPR RI
Damayanti	Deputi Bidang Persidangan
Suratna	Kepala Biro Protokol dan Humas
Fristian Grec	News Anchor Forum Fristian TVRI

Secara teknis keseluruhan rangkaian acara Parlemen dikoordinasikan bersama dengan vendor yang ditunjuk untuk meng*handle* acara virtual. Rangkaian Kegiatan Pembukaan, simulasi sidang Rapat kerja dan rapat paripurna, dan penutupan Parlemen Remaja dilaksanakan secara Live streaming di TVR Parlemen, youtube: DPR RI dan Edukasi Parlemen.



Dalam rangkaian acara Parlemen Remaja 2021 selama 5 hari, setiap peserta dipantau oleh Tim Penilai dan Tim Materi dengan hasil akhir penetapan 5 peserta terbaik.

Hasil dari penilaian terpilihlah 5 orang peserta, yaitu:

1. Azhar Zidane (Daerah pemilihan Jawa Barat X)
2. Dafiq Febriali Sahl (Daerah Pemilihan Jawa Timur II)
3. Wahyu Hidayat (Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I)
4. Ni Made Puspaningsih (Daerah Pemilihan Bali)
5. Anggaraini Indah (Daerah Pemilihan DKI Jakarta I)

Selain pemilihan 5 peserta terbaik, panitia meminta seluruh peserta Parlemen Remaja 2021 untuk memilih salah satu teman untuk dinobatkan menjadi peserta terfavorit melalui aplikasi google form dan mentimeter. Hasil pemilihan suara terbanyak diraih oleh: **Fayyaza Khalisa S. (Dapil Jawa Barat I)** yang dinobatkan sebagai peserta terfavorit pilihan peserta Parlemen Remaja 2021.



5 (lima) orang peserta terbaik dan 1 (satu) orang peserta favorit masing-masing mendapatkan penghargaan piagam dan satu set bluetooth headphone merk Panasonic yang diberikan oleh Bapak Rachmad Gobel Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Industri dan Pembangunan). Selain itu, 5 (lima) orang peserta terbaik dan 1 (satu) orang peserta favorit mendapatkan kesempatan mengikuti pidato kenegaraan dan sidang bersama DPR/DPD/MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2022 di gedung DPR RI dan diundang dalam upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2022.

2.6. Parlemen Kampus

Parlemen Kampus merupakan salah satu jenis kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang dikemas dalam bentuk rangkaian acara Seminar dan Simulasi Persidangan. Para mahasiswa diberikan informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme kerja Parlemen, Tata Cara Persidangan dan topik aktual yang relevan untuk didiskusikan, sesuai dengan tema kegiatan yang diangkat. Selain itu, mahasiswa ditempatkan dalam posisi sebagai anggota dewan dalam kegiatan *role play* simulasi persidangan.

Parlemen Kampus merupakan kegiatan tahunan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum yang saat ini berada dalam Struktur Biro Protokol dan Humas. Untuk kegiatan Parlemen Kampus tahun 2021 ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), sesuai dengan surat masuk dari UIN Malang Nomor: Un.003.001.SB.01/PAN-SKLPAR.SEMA-U/X.09.2021 tanggal 23 September 2021. Hal: Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Parlemen Kampus di UIN Malang; yang dibalas dengan surat persetujuan dari Biro Pemberitaan

Parlemen No: DP/14011/SETJEN DPR RI/BP.02/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Hal:Surat Jawaban Permohonan Kegiatan Parlemen Kampus dengan menyetujui pelaksanaan pada tanggal 9 s.d 10 November 2021. Yang kemudian dilakukan perubahan jadwal sebanyak 2 kali melalui surat jawaban Nomor:B/15959/HM.03.02/11/2021 tanggal 22 November 2021 menjadi tanggal 8 – 9 Desember 2021. Untuk kegiatan di Parlemen Kampus di UIN Malang kali ini mengambil tema “**Paradigma SDG’s dalam Tata Kelola Sampah** ” dan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 8-9 Desember 2021 pukul 08.00 s.d. 17.00 di Aula Gedung Rektorat Lantai 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peserta merupakan mahasiswa/i yang berasal dari kota Malang Raya dan sekitarnya sebanyak 17 Kampus, dengan Jumlah peserta yang hadir pada hari pertama sebanyak 101 orang, dan hari ke dua sebanyak 93 orang



Absen Peserta



Absen Peserta



Absen Peserta



Pembukaan Acara



Pembukaan Acara



Pembukaan Acara



Keynote Speech Pimpinan DPR RI



Sambutan Rektor



Sambutan Sekjen DPR RI

Seminar Nasional yang dibagi ke dalam 2 sesi yaitu penyampaian *keynote speech* oleh Pimpinan DPR RI serta diskusi panel oleh beberapa narasumber. Adapun narasumber untuk kegiatan diskusi panel, adalah:

- Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si (Wakil Ketua DPR RI) sebagai *keynote speaker*
- Luluk Nur Hamidah, M. Si., M. PA (Anggota Komisi IV DPR RI)
- M. Hasanuddin Wahid, M. Hum.(Anggota Komisi IX DPR RI)
- Dr. Indra Iskandar (Sekjen DPR RI)
- Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
- Wahyu Eka Setiawan (Manajer Pendidikan dan Jaringan WALHI Jawa Timur)
- Muhammad Nuruddin (Pegiat Lingkungan & Inisiator Bank Sampah

Dan moderator oleh:

- Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. (Wakil Direktur Pascasarjana UIN Malang)
- Drs. Suratna, M.Si (Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR-RI)



Diskusi Panel Sesi 1



Diskusi Panel Sesi 1



Diskusi Panel Sesi 1



Diskusi Panel Sesi 2



Diskusi Panel Sesi 2



Diskusi Panel Sesi 2

Simulasi Sidang akan disajikan pembekalan materi persidangan dan simulasi sidang dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Materi tanpa praktek akan memberikan keluaran yang tidak maksimal dan tidak efektif serta efisien. Karena itu simulasi adalah suatu keharusan dalam menindak lanjuti materi agar substansi materi itu sendiri dapat dicerna, dipahami dan diaplikasikan oleh peserta. Adapun Simulator sidang DPR adalah beberapa orang Pranata Humas Setjen DPR RI.



Simulasi Sidang



Simulasi Sidang



Simulasi Sidang



Simulasi Sidang



Simulasi Sidang



Simulasi Sidang



Simulasi Rapat



Simulasi Rapat



Evaluasi Simulasi oleh Kepala Biro Protokol dan Humas



Peserta Terbaik



Panitia



Penutupan

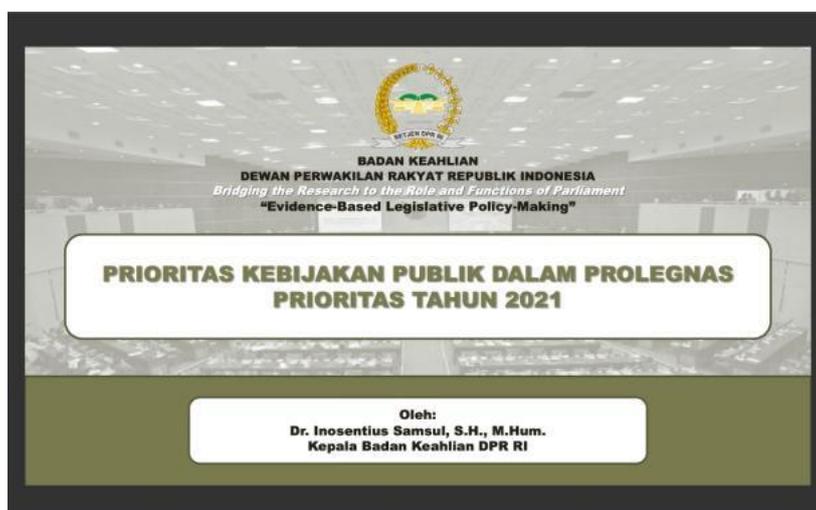
2.7. Bakohumas

Sejak mencanangkan Parlemen Modern, DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai keselarasan antara DPR RI dan Masyarakat yang baik demi terciptanya Parlemen Modern, dibutuhkan dukungan dari semua *stakeholders* yang dimiliki oleh DPR RI. Keberhasilan mencapai Parlemen Modern juga ditentukan oleh kerja sama dan koordinasi lintas kehumasan di Kementerian dan Lembaga di lingkungan Pemerintah. Sebagai Lembaga Negara yang proaktif, DPR RI, melalui Humas Sekretariat Jenderal DPR RI berusaha

mempresentasikan dan mendiseminasikan informasi terkait tugas, fungsi dan kinerja Dewan kepada masyarakat. Upaya penyebarluasan informasi ini disampaikan melalui penyelenggaraan seminar Bakohumas tematik. Seminar Bakohumas tematik menggunakan metode komunikasi *hybrid* yang dapat mempertemukan komunikator (narasumber) dengan komunikan (peserta). Kegiatan seminar Bakohumas tematik dengan tema “PRIORITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROLEGNAS 2021” dan dilaksanakan secara hybrid yang berlokasi di Ruang Abdul Muis dan online pada hari Rabu, 09 Juni 2021 mulai pukul 08:00 WIB.

Narasumber Kegiatan seminar Bakohumas tematik dengan tema “PRIORITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROLEGNAS 2021”

- a. Willy Aditya, S.Fil., Mdm. (Pimpinan Baleg Dpr Ri) ^[1]_[SEP]
- b. Putra Nababan (Anggota Baleg Dpr Ri) ^[1]_[SEP]
- c. Yanuar Nugroho (Pakar Kebijakan Publik) ^[1]_[SEP]
- d. Dr. Inosentius Samsul S.H. M.Hum. (Kepala Badan Keahlian Setjen Dpr Ri) ^[1]_[SEP]
Yang Dimoderatori oleh Indy Rahmawati selaku News Anchor TV One.

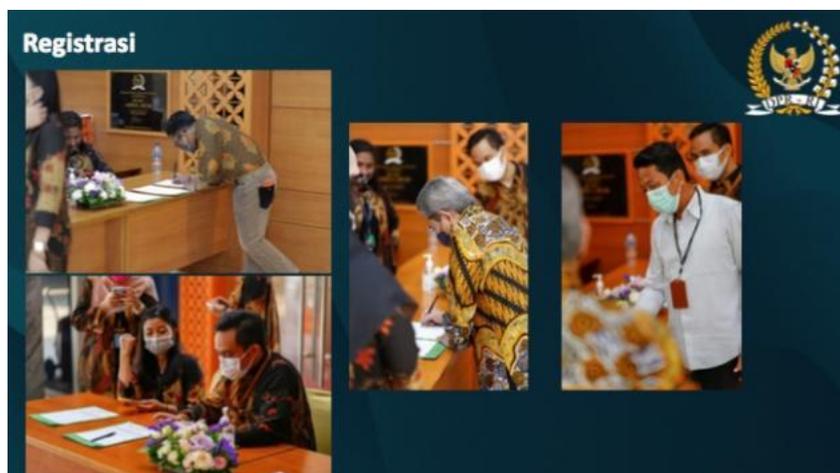


Acara seminar tematik Bakohumas dilaksanakan secara hybrid. Peserta dari Kementerian dan Lembaga hadir melalui daring dan pejabat eselon I, II, dan III serta pegawai di Lingkungan Setjen DPR RI hadir di Ruang Abdul Muis. Hadir di daring 160 orang dan hadir di ruang Abdul Muis 20 orang. Kegiatan dimulai pada pukul 09:00 WIB (ontime) yang dipandu oleh *Master of Ceremony* Ayuningtyas,



Acara seminar tematik Bakohumas secara keseluruhan berjalan lancar dan tepat waktu baik panitia, penyelenggara acara, hingga peserta. Antusias dan tujuan dari acara ini tercapai dilihat dari kehadiran peserta yang melebihi kuota peserta dan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta Seminar. Namun ada beberapa kendala yang terjadi pada satu hari sebelum acara, yaitu kehadiran Pimpinan DPR RI maupun Sekretariat Jenderal yang secara mendadak tidak dapat hadir, maka dari itu kami menjalankan susunan acara plan B, yang seharusnya ada keynote speech dari Ketua DPR RI dan Pembukaan yang disampaikan oleh Sekjen DPR RI digabung menjadi sambutan dan pembukaan yang disampaikan oleh Deputi Persidangan.



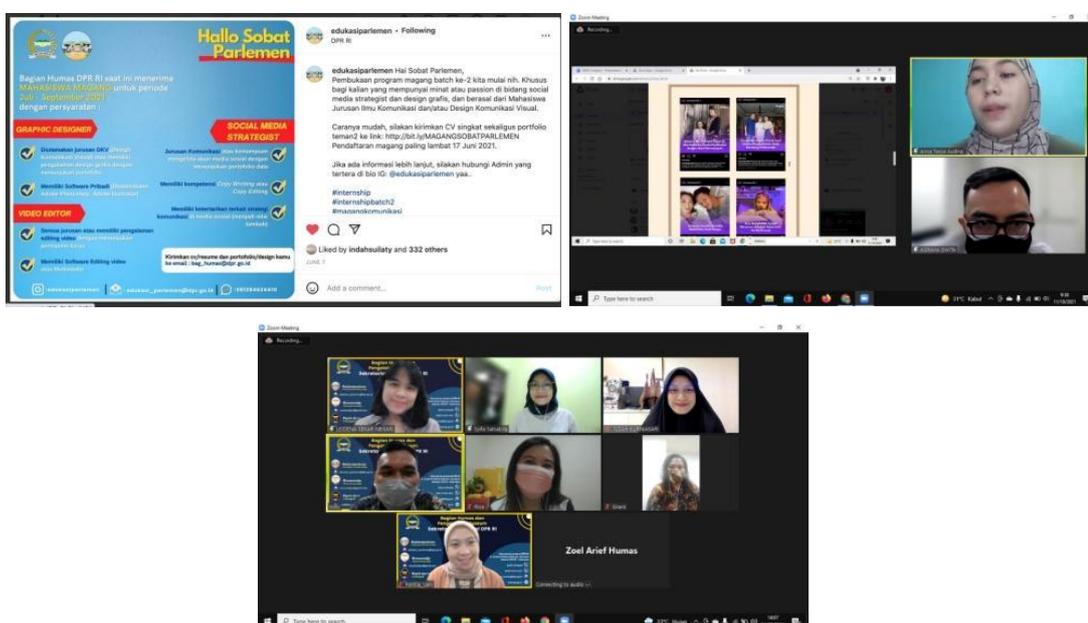


2.8. Kegiatan Magang

Sosial media merupakan wadah masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya memiliki potensi sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif. Kondisi ini kami manfaatkan untuk dapat menyebarkan informasi seputar program-program Kehumasan dan Edukasi Publik tentang Keparlemenan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, akurat dan menarik. Saat ini Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI mengelola 4 akun sosial media, yaitu: Edukasi Parlemen, PPID, Museum DPR RI, dan Parlemen Remaja

mulai dari Instagram, twitter, hingga tiktok. Namun dengan adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, perlu adanya SDM yang memiliki passion dan kemampuan dalam pengelolaan Media sosial. Maka dari itu, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum melakukan penerimaan Magang di bidang media sosial.

Waktu pelaksanaan kegiatan magang atau internship di Bagian Humas dan Pengelolaan Museum dilaksanakan 2 hingga 3 bulan. Sedangkan peserta magang adalah mahasiswa yang berhasil memenuhi syarat dan lolos dalam tahap seleksi wawancara. Total pendaftar mahasiswa magang batch I sejumlah 92 mahasiswa, batch II sejumlah 28 mahasiswa, dan batch III 14 orang yang melamar di bagian Social Media Strategis, Video Editor dan Graphic Design. Pada tahap I, II, dan III terdapat proses seleksi administrasi dan wawancara.



2.8.1. Pelaksanaan Magang

Pembagian Mentor

Jumlah mahasiswa yang masuk dalam proses seleksi sesuai dengan kebutuhan dari masing masing akun sosial media. Pada seleksi magang batch I diterima 12 orang yang ditempatkan di sosial media @edukasiparlemen 4 orang; @ppid.dprri 4 orang, dan @museumdpr 4 orang dengan lama magang 2(dua) bulan. Selanjutnya pada magang batch II diterima 16 orang yang yang ditempatkan di sosial media @edukasiparlemen 4 orang; @ppid.dprri 4 orang, @museumdpr 4 orang, parlemen remaja 4 orang dengan lama magang 3 (tiga) bulan. Dan terakhir pada magang batch III diterima 11 orang yang ditempatkan di sosial media @edukasiparlemen 3 orang, @ppid.dprri 3 orang, @museumdpr 2 orang dan penyelenggaraan kunjungan edukasi 4 orang dengan lama magang 3(tiga) bulan.

Rapat Dewan Redaksi

Dalam rangka penjadwalan konten dan penugasan *person in charge* (pic) satu bulan mendatang ditentukan dalam rapat dewan redaksi yang dilaksanakan setiap akhir bulan

Workshop Karya Anak Magang

Di akhir masa magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah event. Dari proses perencanaan, menghubungi narasumber, hingga pengelolaan event dilaksanakan oleh mahasiswa magang. Pada magang Batch I dan Batch II menyelenggarakan workshop "PR Goes Digital".

2.9. Sosial Media

2.9.1. Edukasi Parlemen

Pada masa Pandemi Covid-19 ini juga telah berkembang inovasi-inovasi untuk tetap produktif yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui sarana media sosial. Melalui *Instagram* @edukasiparlemen Bagian Humas dan Pengelolaan Museum melaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi Dewan dalam bentuk konten – konten yang di desain secara menarik dan informatif diantaranya:

a. *Instagram Live* Edukasi Parlemen

Konten *live streaming* dilaksanakan dalam rangka mengedukasi masyarakat melalui obrolan terkait keparlemenan. Kegiatan *Instagram Live* selama bulan Januari hingga Desember 2021 telah dilaksanakan sebanyak 26 kali.



#EDUTALK

Dukungan Keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat




Drs. Setioka, N.Si
Kepala Biro Protokol dan Humas
Sekretariat Jenderal DPR RI

Agraña Dwita Sulistyajan
Pranata Humas
Sekretariat Jenderal DPR RI

Jumat, 21 Mei 2021 Pukul: 14.00 WIB
Live IG: @edukaparlamen X @protokoldpr

@edukaparlamen | edukat_parlamen@dpr.go.id | 081204634410

#EDUTALK

E-Learning Latsar CPNS Setjen DPR RI 2021

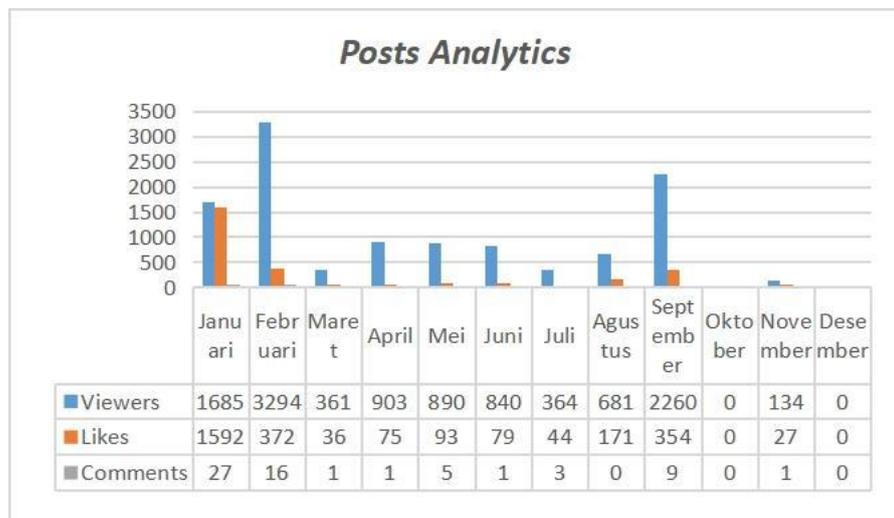



Dr. Desul Barikara Soetiana, M.Pd, QIA
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Indah Kurniasari, S.Si, M.K.E.SOS
Pranata Humas Muda

Jumat, 23 April 2021 Pukul: 14.00 WIB
Live IG: @edukaparlamen X @pusdiklatdpr

@edukaparlamen | edukat_sistem@dpr.go.id | 081204634410



b. Konten Materi Keparlemen

#EDUKAPARLEMEN 2/8

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan melakukan pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan taliahan terhadap laporan hasil pemerkasaan BPK RI.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAKN dapat dibantu oleh sekretan, ahli hukum, ahli keuangan, dan/atau peneliti.



@edukaparlamen | edukat_parlamen@dpr.go.id | 081204634410

#EDUKAPARLEMEN 1/3

Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai ketetapan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. (Pasal 8 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib)

@edukaparlamen | edukat_parlamen@dpr.go.id | 081204634410

#EDUKAPARLEMEN 3/5

Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut representasi Anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan urutan fraksi.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota Badan Anggaran dalam 1 (satu) paket yang bersifat tetap sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

@edukaparlamen | edukat_parlamen@dpr.go.id | 081204634410

#EDUKAPARLEMEN 2/4

Apa itu Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

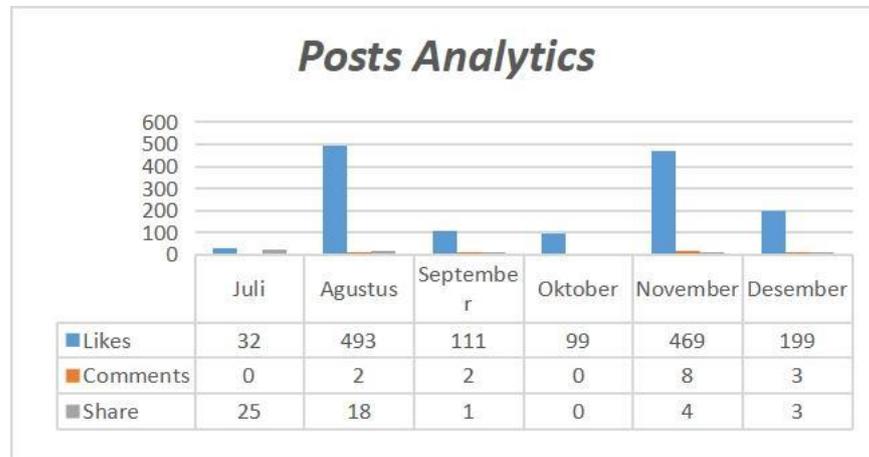
- kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau di dalam pemerintahan;
- undang-undang pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

@edukaparlamen | edukat_parlamen@dpr.go.id | 081204634410

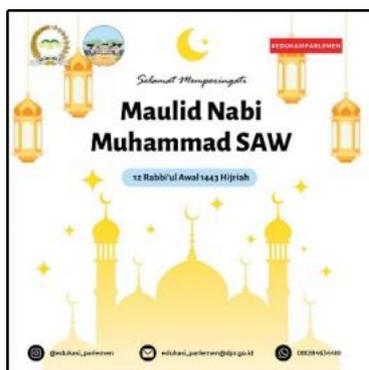


Desain konten postingan berupa informasi yang membahas materi terkait Alat Dewan, dan informasi tentang DPR, agar masyarakat lebih paham Tugas dan Fungsi DPR RI.

Engagement Materi Keparlemenan 2021

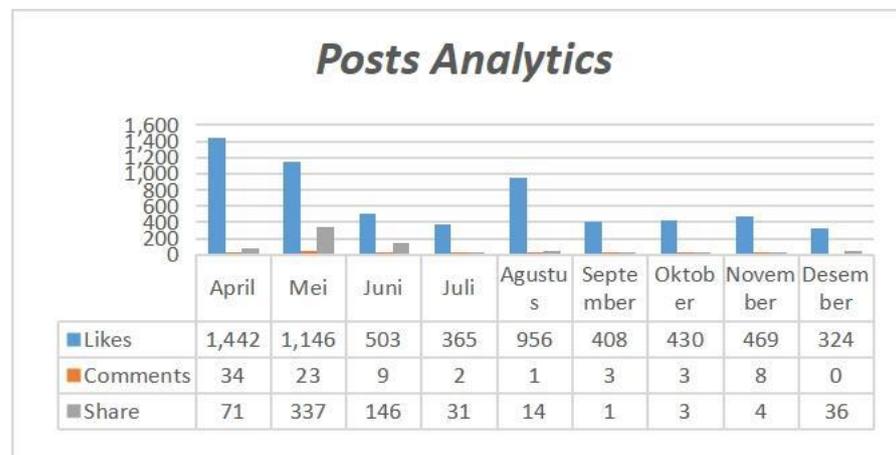


c. Konten Peringatan Hari-Hari Besar





Desain konten postingan berupa ucapan Hari-Hari Besar Nasional merupakan konten yang di posting Setiap adanya hari-hari besar nasional maupun internasional yang akan dibuatkan desain sebagai materi konten postingan.

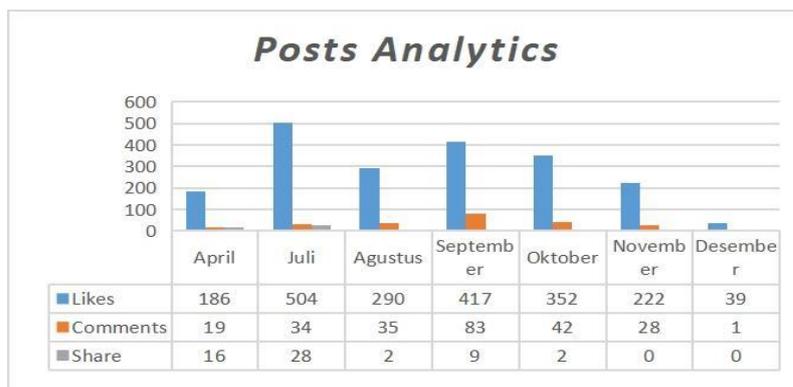


Sumber: *Instagram Dashboard @edukasiparlemen*

d. Konten Kuis Berhadiah

Konten kuis berhadiah merupakan salah satu inovasi baru yang dikonsept oleh Tim Media Sosial Edukasi Parlemen dalam meningkatkan *Engagement followers*, agar adanya interaksi dengan *followers*. Soal-soal kuis yang diangkat terkait dengan materi-materi yang sebelumnya sudah di posting, agar adanya engagement followers terhadap konten.





2.9.2. PPID

Sepanjang tahun 2021, Tim Sosial Media @ppid.dprri telah mengunggah 87 konten dengan rincian 76 konten berupa poster edukasi PPID, 4 konten kuis, dan 7 konten video termasuk IG Live. Sedangkan rata – rata frekuensi penayangan konten adalah 7 kali unggah per bulan. Jumlah ini naik lebih dari 100% dibandingkan total konten yang diunggah pada tahun 2020 lalu, yaitu sejumlah 35 konten.



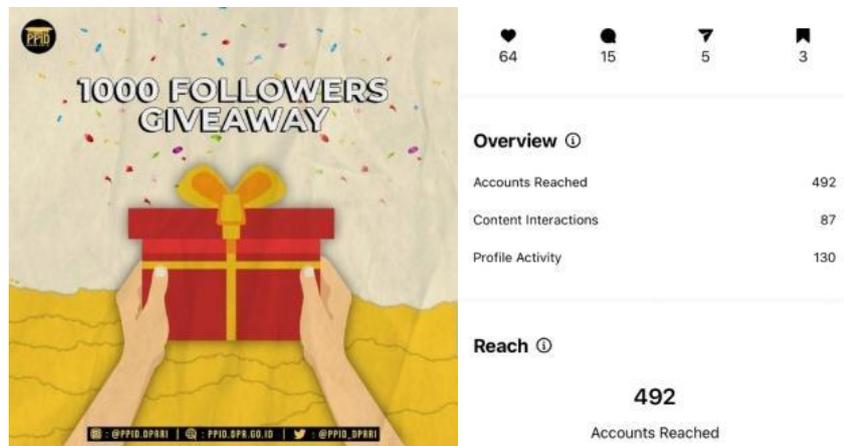
a. Kuis

1) Kuis Hari Anak Nasional



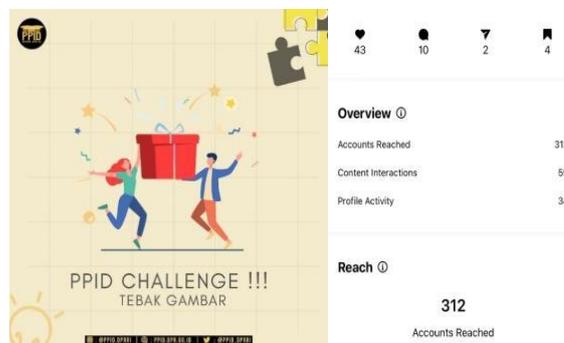
Kuis Hari Anak Nasional tayang pada tanggal 23 Juli 2021, dengan jumlah *reach* 349 akun dan kuis diikuti oleh 13 akun.

2) Giveaway 1000 Followers



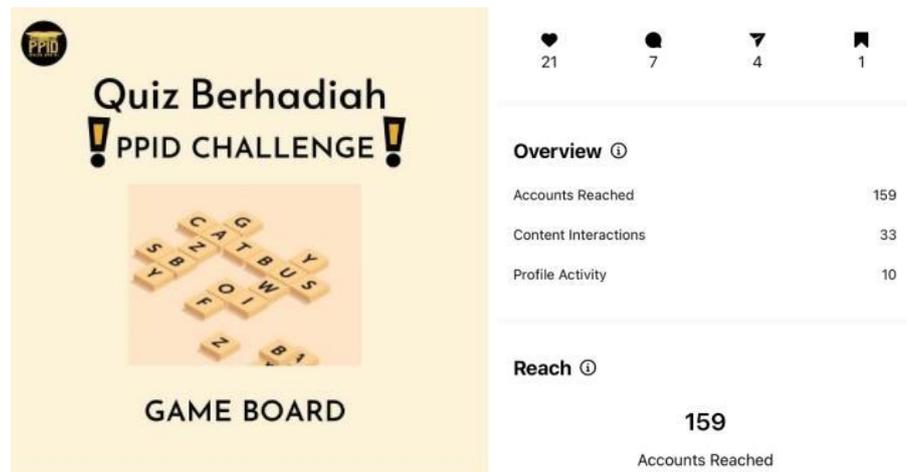
@ppid.dprri mengadakan *giveaway* guna merayakan tercapainya 1.000 *followers*. Adapun *giveaway* ini berhasil menjangkau 492 akun dengan total interaksi (*likes*, *share*, *save*, dan komen) sebanyak 87 kali.

3) Kuis PPID Challenge – Tebak Gambar



Kuis *PPID challenge* Tebak Gambar merupakan inovasi baru dengan mengajak *followers* untuk menebak UU yang tepat berdasarkan potongan – potongan gambar yang disajikan dan tayang pada tanggal 9 November 2021. Kuis ini *PPID challenge* Tebak Gambar berhasil menjangkau 312 akun dengan total interaksi sebanyak 59 kali.

4) Kuis PPID Challenge – Game Board



PPID challenge Game Board tayang pada tanggal 24 Desember 2021, sehingga belum memperoleh jumlah jangkauan yang maksimal. Kuis ini mengajak *followers* untuk menjawab inovasi – inovasi yang dilakukan oleh PPID Setjen DPR RI sepanjang tahun 2021, yaitu Sistem Informasi Arsip (SIAR), SIMAS PUU, dan Prolegnas.

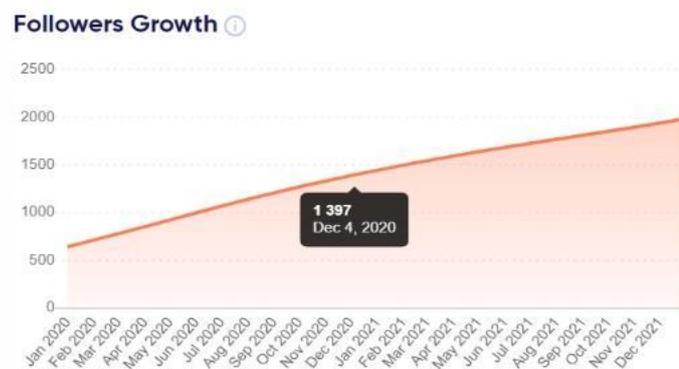
b. Top Konten



Konten yang mendapatkan tingkat keterlibatan khalayak tertinggi di tahun 2021 adalah konten ucapan “Selamat Hari Pahlawan” dengan total jangkauan sebanyak 1.279 akun dan total interaksi sejumlah 40 kali. Konten ini memperkenalkan pahlawan masa kini yang terdiri dari atlet bulu tangkis Indonesia, band metal yang mengharumkan nama bangsa, serta pahlawan Nasional K.H. Agus Salim.

2.9.3. Museum

Di era digital seperti sekarang, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum berusaha memberikan perhatian khusus pada media komunikasi digital seperti sosial media. Museum DPR RI berusaha menggunakan beberapa platform (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube dengan nama akun @museumdpr) untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi kepada publik. Dan di tahun 2021, Instagram Museum DPR RI telah mengunggah 74 postingan dengan rata-rata posting 6 konten perbulan. Postingan-postingan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tema/seri konten seperti Ulang Tahun Hari Ini, Peristiwa Hari Ini, Gedung DPR Tempo Dulu, Peringatan Hari Besar Nasional dan Internasional, Koleksi @museumdpr, Pimpinan DPR Tempo Dulu, Postingan Belasungkawa dan Publikasi Kegiatan.



Selama tahun 2021, media sosial Instagram (@museumdpr) mengalami penambahan jumlah pengikut sebesar **+590 Followers** atau naik **+42,23%** dari jumlah followers tahun lalu (Desember 2020). Per 4 Desember 2020, pengikut akun instagram @museumdpr berjumlah 1.397 dan per 30 Desember 2021 menjadi 1.984. Dari 1.984 pengikut tersebut, diketahui bahwa 52,35% bergender laki-laki dan 47,65% adalah perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konten-konten Museum DPR dapat dikonsumsi setiap gender secara netral.

Dalam kurun waktu 1 tahun sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, enam konten teramai @museumdpr didominasi oleh konten-konten terkait kegiatan seminar dan pameran daring. Namun di posisi pertama dengan jumlah dilihat sebanyak 1.234 kali dan berhasil menarik minat 14 pengikut baru adalah postingan berjudul "*Mengapa Pidato Kenegaraan Presiden Dilaksanakan Setiap Tanggal 16 Agustus dan di Depan Anggota DPR?*".



Diposting: 15 Agustus 2021

Dilihat: 1.234 akun

Disukai: 134

Disimpan: 6

Komentar: 1

Dibagikan: 1

Penambahan pengikut dari pemirsa postingan: +14



Diposting: 03 Mei 2021

Dilihat: 932 akun

Disukai: 111

Disimpan: 12

Komentar: 2

Dibagikan: 64

Penambahan pengikut dari pemirsa postingan: +22



Diposting: 22 Mei 2021

Dilihat: 695 akun

Disukai: 89

Disimpan: 0

Komentar: 2

Dibagikan: 7

Penambahan pengikut dari pemirsa postingan: +0



Diposting: 13 Oktober 2021

Dilihat: 584 akun

Disukai: 76

Disimpan: 10

Komentar: 0

Dibagikan: 3

Penambahan pengikut dari pemirsa postingan: +2

2.9.4 Kunjungan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: SJ/04008/SETJEN DAN BK DPR RI/KP.03/03/2020 tentang Kewaspadaan Terkait Covid-19 disebutkan bahwa Setjen DPR RI melakukan penanguhan sementara penerimaan Study Tour dan Kunjungan Delegasi dari Daerah ke DPR RI. Terkait dengan hal tersebut maka pelayanan penyaluran kunjungan masyarakat dilakukan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut Rekap Penerimaan Kunjungan Masyarakat:

No.	Bulan	Jumlah (Orang)
1	Januari	1
2	Februari	2
3	Maret	15
4	April	62
5	Mei	3
6	Juni	42
7	Juli	0
8	Agustus	0

9	September	35
10	Oktober	446
11	November	1967
12	Desember	3028
Jumlah Keseluruhan		5601

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kunjungan masyarakat terdapat gradasi setiap bulannya. Hal ini tentunya di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan kegiatan. Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut tentunya didasarkan pada kondisi penyebaran Covid-19 yang juga mengalami pasang surut.

Sedangkan, Sosialisasi Aplikasi Silugas telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu ke DPRD Kota Medan pada tanggal 3-5 Maret 2021 dan juga DPRD Kota Malang pada tanggal 30 September-1 Oktober 2021 guna mendapatkan masukan terkait pelayanan dan sosialisasi aplikasi penerimaan kunjungan masyarakat di DPR RI.



2.10. Pencapaian

2.10.1. PR Indonesia Award 2021

Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI mendapat penghargaan *Silver Winner* dalam Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2021 pada sub kategori Government PR. Program yang diusung Humas Setjen DPR adalah Edukasi Parlemen **#dirumahaja** dengan *key message* **'Kenal DPR Walau di Rumah Aja'**. Program tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan sebagai unsur *supporting system* DPR RI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kinerja DPR sebagai lembaga legislatif di tengah pandemi Covid-19. PRIA merupakan ajang kompetisi yang mengapresiasi kinerja kehumasan yang unggul dari korporasi seluruh Indonesia. Tercatat ada 124 instansi, lembaga pemerintah, dan korporasi turut meramaikan sebelas kategori. Adapun totalnya mencapai 599 entri. Selain Deputy Bidang Persidangan, penghargaan ini turut dihadiri Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Pusat Data dan Penelitian, dan Kepala Bagian Humas beserta jajaran.



2.10.2. Monev KIP – PPID Informatif

PPID Setjen DPR RI merupakan salah satu badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi Pusat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menilai apakah PPID badan publik sudah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena masih dalam suasana pandemi, seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring. Proses monev dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya pengisian kuesioner, pembuatan video yang menjelaskan inovasi dan presentasi kepada dewan juri. Pada tahun 2021, PPID Setjen DPR RI berhasil mendapatkan predikat sebagai **Badan Publik Informatif** dengan perolehan nilai **96,52**.



3. Bagian Perpustakaan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, terdapat 2 (dua) indikator yang harus dicapai perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah kunjungan ke Perpustakaan DPR RI

Indikator Kinerja 1:	
Jumlah kunjungan ke Perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	
Target	Realisasi
8.000 orang	11.658 orang, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 1.062 pengunjung fisik - 3.542 pengunjung online (website) - 491 pengunjung email - 4.035 pengunjung DPR e-Library - 1.233 pengunjung acara seminar dan <i>workshop</i> - 1.295 pengunjung SIPINTER

Perbandingan Capaian

Tabel 2 Perbandingan jumlah kunjungan ke Perpustakaan DPR RI

Tahun 2020	Tahun 2021
8.575 orang	11.658 orang

Pada tahun 2021 target capaian kunjungan ke Perpustakaan DPR RI melebihi target hingga 136%. Bila dilihat dari angka kunjungan maka kunjungan fisik ke perpustakaan masih sangat kecil dikarenakan masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan masuk ke wilayah Gedung DPR RI. Pada tahun 2021 perpustakaan mengefektifkan kembali buku tamu di pintu masuk perpustakaan setelah sebelumnya di tahun 2020 sempat tidak dapat diakses karena gangguan sistem akibat *redesign* perpustakaan.

Berdasarkan data *Google Analytic*, kunjungan online melalui website masih mendominasi kunjungan perpustakaan. Layanan DPR e-Library dan SIPINTER yang dibuka ke masyarakat pada pertengahan tahun 2020 telah dimanfaatkan oleh masyarakat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang mengakses aplikasi ini. Perpustakaan juga senantiasa melaksanakan promosi perpustakaan melalui penyelenggaraan seminar atau webinar dengan beragam tema menarik yang mampu menjaring peserta sebanyak 1.233 orang.

Walaupun capaian telah melampaui target, masih dijumpai hambatan atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Perpustakaan DPR RI belum dapat menjadi sumber rujukan yang lengkap bagi internal maupun eksternal dalam mencari produk-produk terbitan DPR RI
- b. Perpustakaan DPR RI masih kesulitan dalam bekerjasama dengan unit kerja lain untuk mendapatkan terbitan seluruh karya DPR RI agar dapat tersimpan di Repositori DPR RI
- c. Belum adanya peraturan yang memaksa unit kerja untuk menyerahkan produk terbitannya ke Perpustakaan
- d. Belum adanya pedoman pengelolaan perpustakaan yang lebih rinci dalam hal pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, pelayanan, dan kegiatan perpustakaan
- e. Belum adanya skala prioritas yang terukur dari setiap pekerjaan atau kegiatan perpustakaan

Berdasarkan hambatan/kendala yang telah dipaparkan di atas, langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial;
- b. Mensosialisasikan layanan Perpustakaan DPR RI;
- c. Membuat pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) berbagai kegiatan dan layanan perpustakaan;
- d. Melaksanakan Roadmap yang telah dibuat;
- e. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Unit-Unit Kerja yang ada di lingkungan DPR RI dalam rangka mendapatkan terbitan DPR RI untuk Repositori;
- f. Bergerak aktif untuk menyampaikan perkembangan pustaka yang masuk dalam Repositori DPR RI dan secara masif dan terstruktur mengajak setiap Unit Kerja untuk menyerahkan pustaka dan literatur yang diciptakan setiap unit kerja.

Tabel 3 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perpustakaan

Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	
Target	Realisasi
3,20	3,17

Perbandingan Capaian

Tabel 4 Perbandingan Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perpustakaan

Tahun 2020	Tahun 2021
3,17	

Angka Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perpustakaan diambil dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen DPR RI tahun 2021.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021:

3.1. Pembuatan kebijakan mengenai tata kelola perpustakaan sebagai berikut:

a. Peraturan Sekjen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan telah ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Peraturan ini memuat dasar hukum tentang penyelenggaraan perpustakaan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.

b. Roadmap Tata Kelola Perpustakaan

Roadmap Perpustakaan merupakan arah bagi Perpustakaan DPR RI agar dapat memberikan layanan perpustakaan prima bagi pemustaka, baik itu Anggota DPR RI sebagai *stakeholder* utama, ASN Setjen DPR RI, Tenaga Ahli dan masyarakat. Roadmap perpustakaan DPR RI dirancang untuk fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Adapun Pembuatan Roadmap bertujuan untuk menyediakan acuan perencanaan Perpustakaan DPR RI Tahun 2022-2030 sebagai arah, tujuan, dan tahapan pengembangan serta penguatan Perpustakaan DPR RI berkontribusi mencapai misi Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya berkaitan dengan penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI serta tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan Sekretariat Jenderal DPR RI. Maksud dari penyusunan Roadmap Perpustakaan DPR RI, yaitu:

- Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengembangan Perpustakaan DPR RI secara bertahap dan berkelanjutan;

- Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perpustakaan DPR RI selama 8 tahun ke depan;
- Memberikan pedoman bagi Perpustakaan DPR RI dalam merencanakan pengembangan perpustakaan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

3.2. Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pengembangan koleksi merupakan kegiatan inti yang mempunyai tugas untuk mengadakan serta memperluas koleksi dalam hal pengembangan koleksi di suatu perpustakaan. Pada dasarnya hal utama setiap perpustakaan ialah membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemakai perpustakaan.

Pada Tahun 2021 Perpustakaan telah melakukan penambahan koleksi buku sebanyak 634 judul (1.214 eksemplar), koleksi buku elektronik sebanyak 21 eksemplar, dan koleksi elektronik yang dapat diakses pada DPR e-Library (baca koleksi perpustakaan DPR melalui gawai) sebanyak 703 judul buku, koran dan majalah.

Perpustakaan DPR RI juga melanggan *electronic resources* yaitu:

- *Economic Intelligence Unit (EIU)*;
- Jurnal Online JSTOR;
- Penyediaan Database Perundang-undangan eCLIS;
- Penyediaan Akses Koran Digital

Pada tahun 2021 penyediaan layanan akses koran digital telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi bagian analis media, dan tenaga fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan digital dan menciptakan kelengkapan koleksi terbitan DPR RI, Perpustakaan DPR telah melakukan alih media sebanyak 147 judul yang nantinya ditampilkan pada Repositori DPR RI sehingga masyarakat dapat mengakses dimanapun dan kapanpun tanpa terhalang ruang dan waktu. Pengembangan koleksi Perpustakaan DPR RI juga dilakukan melalui *recataloging* Koleksi Tua Perpustakaan DPR RI yang merupakan koleksi perpustakaan peninggalan zaman Volksraad sebanyak 208 judul.

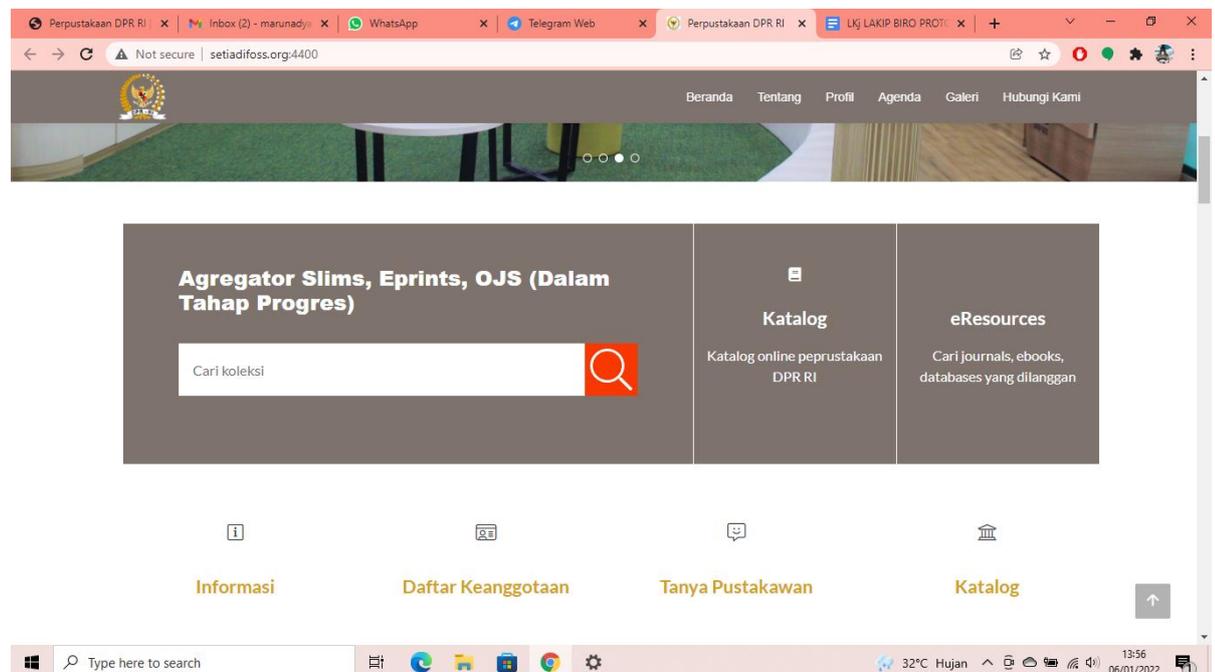
Pada tahun 2021 perpustakaan juga melakukan perbaikan sarana pengolahan koleksi perpustakaan untuk mempercepat pengolahan koleksi sehingga koleksi dapat lebih cepat ke pengguna yaitu dengan pengadaan akses website pedoman pengolahan perpustakaan atau *Dewey Decimal Classification (DDC)* elektronik. DDC elektronik ini memungkinkan pustakawan dapat mengolah buku dari rumah ketika sedang *work from home*.

Kegiatan Pengembangan koleksi juga meliputi kegiatan perawatan koleksi. Perawatan koleksi yang dilaksanakan adalah fumigasi untuk membasmi kutu buku yang keberadaannya merusak buku. Fumigasi dapat menambah umur pemakaian koleksi perpustakaan sehingga koleksi dapat digunakan oleh pemustaka lebih lama. Fumigasi dilaksanakan di seluruh area perpustakaan yang bervolume 2.461,48 m³.

3.3. Pelayanan Perpustakaan

Layanan Bidang Perpustakaan dapat diakses di <http://perpustakaan.dpr.go.id>. Berdasarkan data *google analytic* jumlah angka kunjungan melalui website sebanyak 3.542 orang. Melalui website perpustakaan pengguna dapat melakukan pencarian koleksi, melihat koleksi terbaru, melihat statistik pengunjung website perpustakaan, mendapatkan informasi jadwal kegiatan perpustakaan DPR RI, memberikan usulan koleksi baru, serta mengakses berbagai layanan perpustakaan DPR.

Melihat jumlah peminat yang berkunjung ke website perpustakaan cukup banyak dan dalam rangka memudahkan pemustaka memperoleh informasi secara efektif dan efisien serta untuk tujuan tampilan website yang lebih menarik, Perpustakaan DPR RI pada tahun 2021 melaksanakan *Redesign Website Perpustakaan* agar lebih informatif dan sesuai perkembangan zaman. Tampilan Website yang baru akan segera launching, saat ini masih terdapat kendala teknis beberapa perbaikan harus dilakukan dan persyaratan teknis dari Pusat Teknologi dan Informasi yang belum dipenuhi oleh perpustakaan.



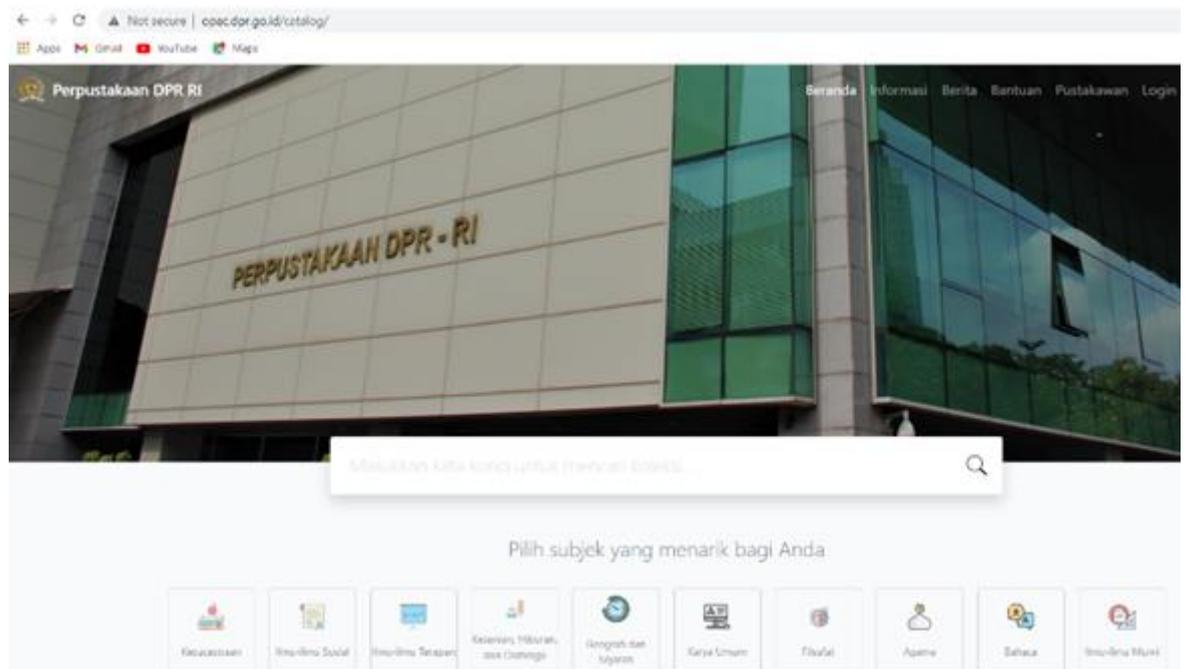
Redesign Website Perpustakaan DPR RI

Website merupakan garda terdepan sebelum masuk ke dalam pangkalan data layanan perpustakaan. Perpustakaan DPR RI melakukan pembenahan tidak hanya pada website tetapi juga layanan Perpustakaan yang ada di website. Kegiatan layanan perpustakaan yang dikembangkan di tahun 2021 sebagai berikut:

Layanan Katalog Perpustakaan

Jumlah penambahan judul buku pada katalog Perpustakaan DPR RI pada tahun 2021 sebanyak 649 judul 1.118 eksemplar). Penambahan jumlah judul buku berasal dari pengadaan buku baru bersumber dari pembelian, *recataloging* buku-buku langka koleksi Perpustakaan DPR RI yang merupakan peninggalan perpustakaan zaman Volksraad, dan pengolahan buku-buku *local content* terbitan DPR RI. Kegiatan pengolahan ini dilakukan untuk tujuan meningkatkan keterpakaian koleksi, kemudahan akses dan kelengkapan koleksi terutama terbitan DPR RI, sumber referensi legislasi, serta sarana pembelajaran proses legislasi.

Katalog perpustakaan cukup efektif dipergunakan oleh pemustaka hal ini dilihat dari jumlah pengunjung yang mengakses katalog perpustakaan sebanyak 1.062 pengunjung selama tahun 2021. Selain itu dalam rangka memperbaiki tampilan pada tahun 2021 dilaksanakan upgrade pada aplikasi ini.

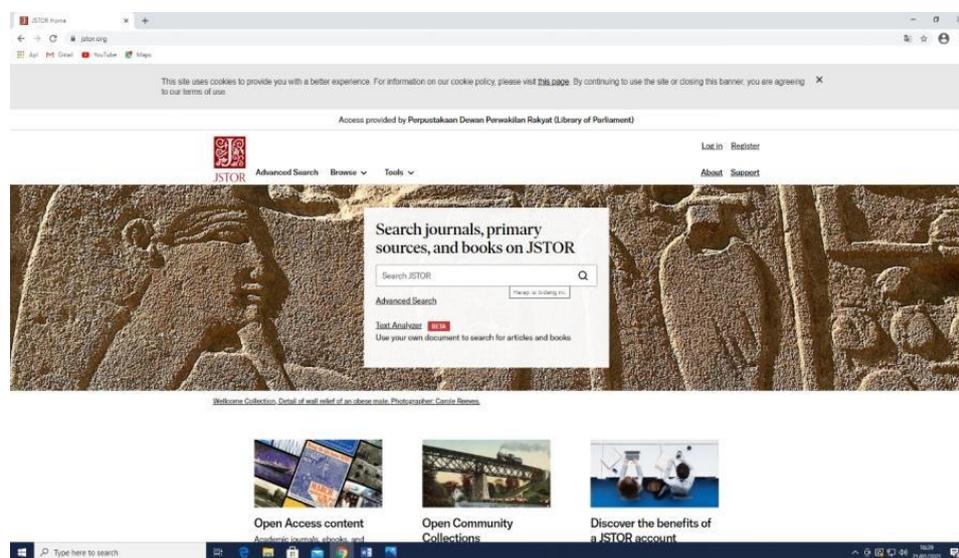


Katalog Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <http://opac.dpr.go.id/catalog/>)

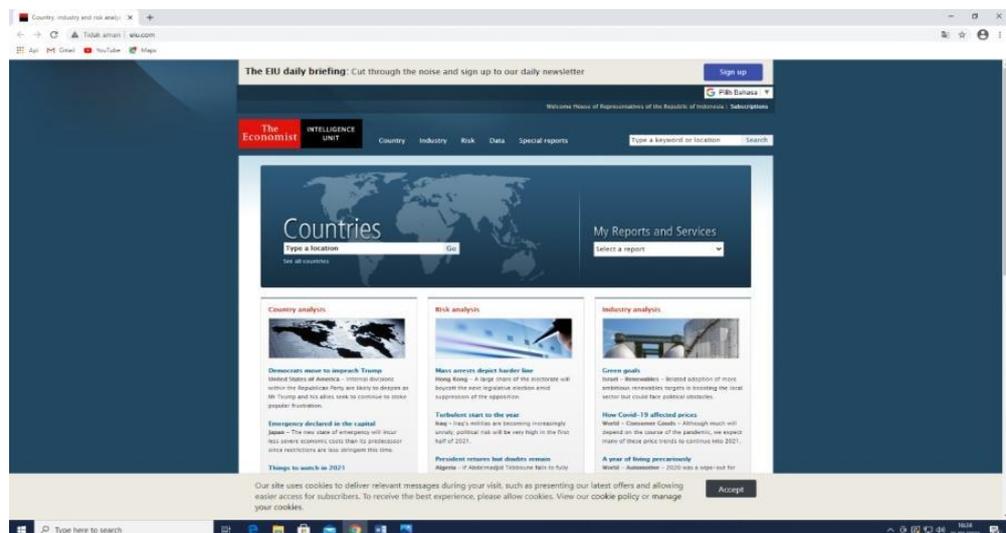
Layanan *Electronic Resources (e-resources)*

Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, Perpustakaan DPR RI melanggan berbagai bahan perpustakaan *digital online* atau *electronic resources* seperti jurnal, *ebook*, dan karya-karya referensi *online* lainnya. Koleksi *e-resources* ini hanya dapat diakses oleh pemustaka internal Perpustakaan DPR RI. Koleksi yang diakses oleh pemustaka internal adalah JSTOR, *The Economist Intelligence Unit*, akses *online* koran elektronik (Kompas, The Jakarta Post, Majalah Tempo dan Koran Tempo, serta Koran Bisnis Indonesia).

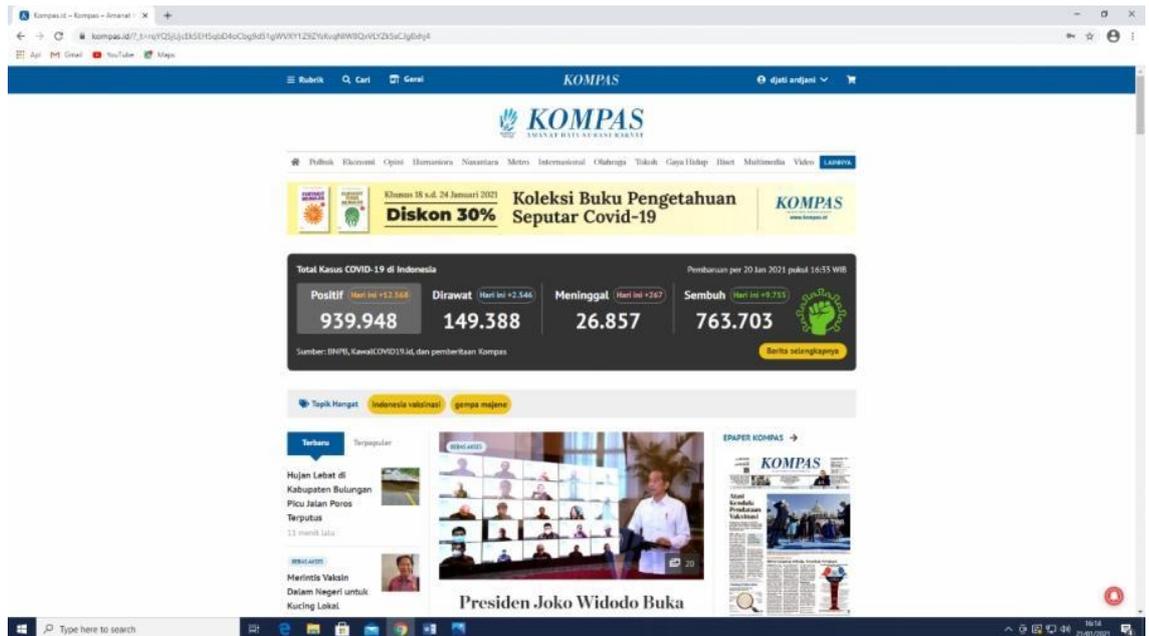
Keberadaan layanan *e-resources* di masa pandemi Covid-19 sangat membantu sebagai bahan referensi bagi pemustaka internal yaitu para peneliti, tenaga ahli, dan *legal drafter* yang melakukan kerja dari rumah.



Electronic Resources JSTOR Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <https://www.jstor.org/>)



Electronic Resources Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <http://www.eiu.com/>)



*Electronic Resources Perpustakaan DPR RI
Sumber: <https://kompas.id/>*

Layanan Sarana Penelitian

Layanan sarana penelitian merupakan layanan perpustakaan dalam rangka membantu kelancaran tugas peneliti dan meningkatkan standar tulisan ilmiah peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Layanan yang disediakan adalah penyediaan akses anti plagiarisme, pengecekan *grammar*, dan nomor unik permanen di setiap artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan (*Digital Object Identifier*).

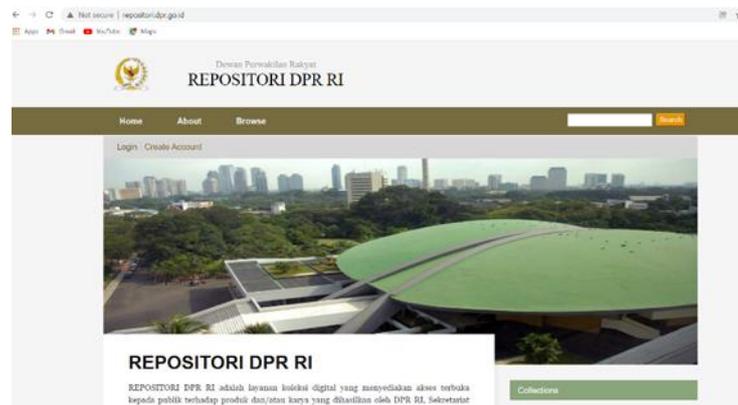
Layanan Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah

Layanan ini berupa penyediaan surat kabar dan majalah untuk bahan bacaan di ruang baca perpustakaan, para Anggota DPR RI, ASN di Alat Kelengkapan Dewan, ASN di Setjen DPR RI, dan Tenaga Ahli DPR RI sebagai bahan referensi perkembangan situasi terkini. Surat kabar nasional dan daerah yang dilanggan sebanyak 17 judul berasal dari yaitu: Media Indonesia, Sindo, Kompas, Jakarta Post, Kontan, Rakyat Merdeka, Republika, Bisnis Indonesia, Poskota, Daily Investor, Indopos, Jakarta, Harian Terbit, Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, dan Pikiran Rakyat. Sedangkan Majalah nasional yang dilanggan sebanyak 10 judul yaitu: Gatra, Tempo, Infobank, As Sunnah, Hidayatullah, Intisari, Femina, National Geographic Indonesia, Swasembada, dan Trubus. Untuk Tabloid dilanggan Nova dan Otomotif.

Layanan Repositori DPR RI

Repositori DPR RI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh koleksi terbitan DPR RI dalam bentuk digital yang dapat diakses *fulltext* pada laman <http://repositori.dpr.go.id/>. Jumlah penambahan koleksi terbitan DPR RI dalam repositori pada tahun 2021 sebanyak 32 judul.

Pada tahun 2021 dalam rangka meningkatkan memberikan kemudahan dalam penelusuran koleksi terbitan DPR RI dan memperbaiki tampilan website Repositori DPR RI maka dilakukan upgrade system pada aplikasi ini.

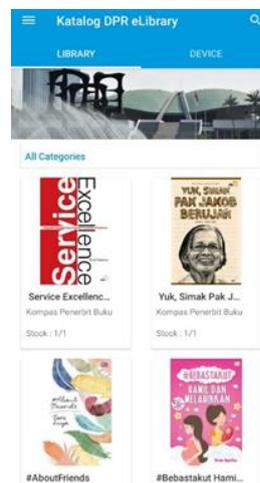


Gambar Aplikasi Repositori DPR RI

Sumber: <http://repositori.dpr.go.id/>

Layanan DPR e-Library

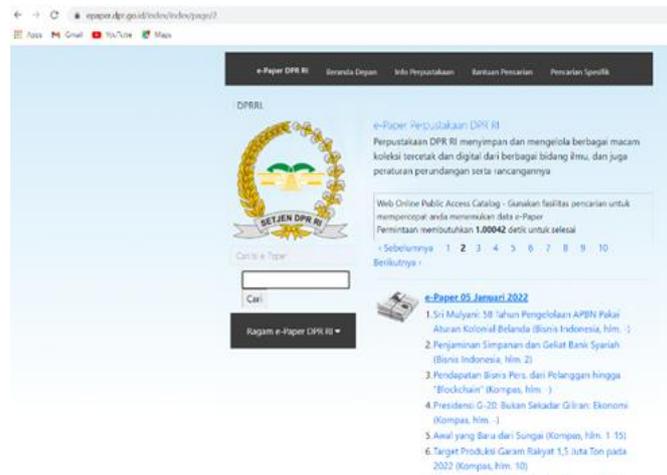
Layanan DPR *e-Library* adalah membaca buku melalui *gadget*. Layanan ini hadir dalam rangka mendekatkan koleksi perpustakaan dengan pemustaka dimana saja dan kapan saja pemustaka dapat membaca buku melalui *gadgetnya*. Layanan DPR *e-Library* mulai dibuka aksesnya kepada masyarakat umum mulai tahun 2020. Jumlah peminjam buku melalui DPR *e-Library* pada tahun 2021 sebanyak 4.035 orang.



Aplikasi DPR e-Library

Layanan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)

Aplikasi baru perpustakaan DPR RI di-*launching* pada tanggal 16 Juli 2020. Layanan ini dibuat pada masa pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk memberi dukungan bahan-bahan penyusunan RUU bagi Anggota DPR RI. Namun demikian layanan ini akan terus dilanjutkan dan dimanfaatkan oleh Anggota Dewan di masa yang akan datang. Pada tahun 2021, sebanyak 19 topik dari berbagai isu legislasi, pengawasan, anggaran dan diplomasi parlemen telah diunggah dan sebanyak 1.295 orang telah mengaksesnya.

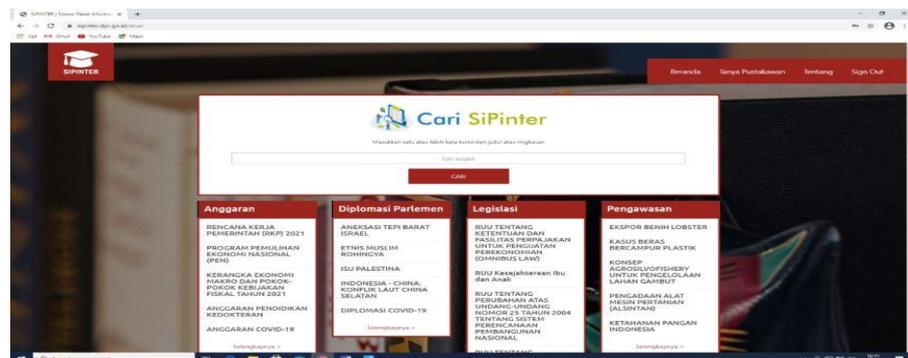


Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)

Sumber: <https://sipinter.dpr.go.id>

Layanan e-Paper

Layanan e-Paper disini adalah kumpulan berita atau artikel berkaitan dengan fungsi DPR (anggaran, pengawasan dan legislasi) terhadap pasangan kerjanya yang berasal dari sumber informasi koran elektronik yang dilanggan oleh Perpustakaan DPR. Layanan e-Paper merupakan salah satu inovasi layanan yang dikembangkan oleh Perpustakaan DPR sejak tahun 2015. Pada tahun 2021 sebanyak 706 berita atau artikel telah diunggah oleh pustakawan dalam aplikasi ini.

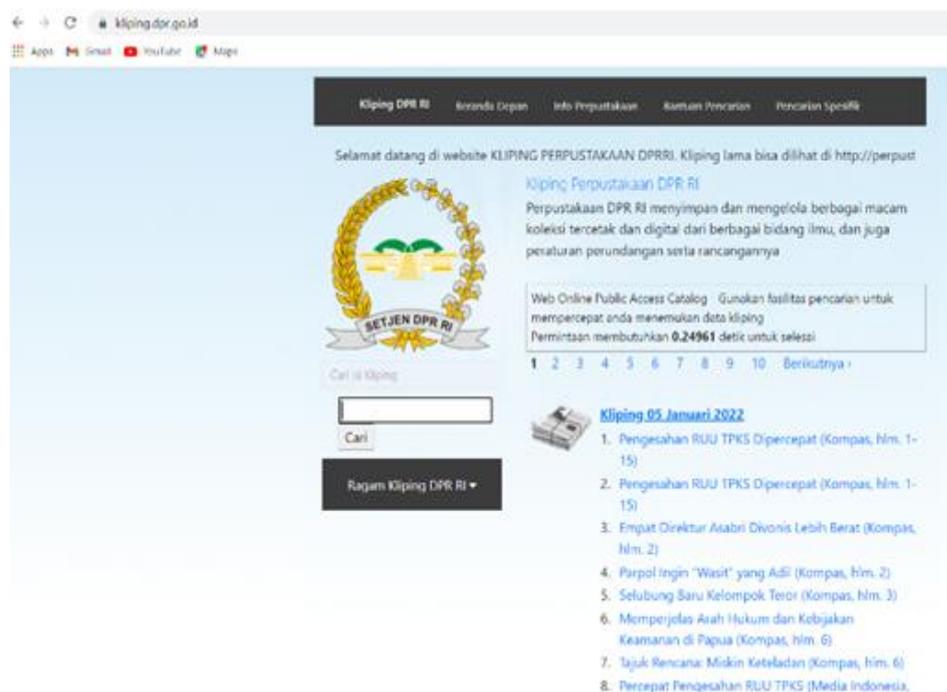


Aplikasi e-Paper

Sumber: <https://epaper.dpr.go.id>

Layanan Kliping elektronik atau e-kliping

Merupakan salah satu layanan dari Perpustakaan DPR RI. Kliping elektronik bermula dari kliping manual yang dibuat sejak tahun 2003. Kliping manual ini dibuat per hari dari surat kabar nasional yang dilanggan oleh Perpustakaan DPR RI. Kemudian kliping ini disebar ke pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Tujuan pembuatan kliping ini adalah untuk mendokumentasikan berita tentang DPR. Seiring dengan berjalannya waktu, kliping manual semakin diminati oleh penggunanya sehingga permintaan meningkat. Dengan melihat dari permintaan yang semakin meningkat, adanya batas waktu kliping sampai di pengguna, dan banyaknya kertas yang digunakan, Perpustakaan ingin memangkas semua hambatan tersebut agar menjadi efektif, efisien dan menjangkau lebih banyak pengguna. Oleh karenanya kliping manual dikembangkan menjadi kliping elektronik atau e-kliping. Pengembangan kliping manual menjadi e-kliping merupakan penerapan teknologi informasi, yang dibuat oleh pranata komputer Sekretariat Jenderal DPR RI. Jumlah e-kliping diunggah pada tahun 2021 sebanyak 1.765 judul.



Aplikasi e-Kliping

Sumber: <https://kliping.dpr.go.id>

Layanan Database Perundang-Undangan eCLIS

eCLIS.id adalah sistem kodifikasi dan informasi hukum elektronik yang hadir untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan impian agar akses hukum terbuka seluas-luasnya untuk semua dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam prosesnya melalui kompetensi utamanya Peraturan terkuifikasi. eCLIS merupakan platform yang didesain untuk

memudahkan pengguna menemukan peraturan perundang-undangan Indonesia.



Aplikasi E-CLIS

Sumber: <https://eclis.id>

3.4. Pameran/Seminar/Workshop

Pada tahun 2021 Perpustakaan DPR tidak menyelenggarakan pameran maupun mengikuti pameran yang diadakan oleh instansi atau lembaga lain sehingga anggaran kegiatan ini dimanfaatkan untuk seminar atau webinar. Pada masa pandemi dimana pertemuan langsung dengan banyak orang harus dikurangi, sehingga webinar menjadi sarana yang tepat dan praktis untuk menyelenggarakan seminar secara online. Selain praktis penyelenggaraan webinar juga sangat ekonomis dan mampu menjangkau semua wilayah yang sudah memiliki jaringan internet. Panitia, pemateri dan peserta yang masing-masing beda di tempat tidak menjadi kendala. Biasanya yang menjadi kendala adalah jaringan yang kurang lancar dan listrik yang padam. Perpustakaan bisa menyelenggarakan kegiatan webinar kapan saja dan dari mana saja. Persiapan webinar juga lebih cepat dan praktis, tidak seperti jika penyelenggaraan langsung. Webinar hanya perlu host yang bertugas mengatur dan memandu pelaksanaan webinar, pemateri yang akan memberikan materi secara online, peserta yang tergabung dalam webinar dari lokasi masing-masing dan jaringan listrik dan internet.

Kegiatan seminar/workshop yang diikuti terbagi dalam:

- Keikutsertaan perpustakaan DPR RI dalam webinar yang diselenggarakan oleh instansi di luar DPR RI;
- Penyelenggaraan seminar oleh Perpustakaan DPR RI;
- Peran serta Pustakawan sebagai narasumber dalam webinar

Lembaga perpustakaan yang banyak memberikan pelatihan untuk pustakawan melalui webinar diantaranya Perpustakaan Nasional RI, Perpustprov, Perpustakaan Kementerian dan Lembaga dan Asosiasi Perpustakaan baik nasional maupun internasional, kesempatan ini sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan pustakawan. Dengan pemberi materi yang sudah

mahir dalam ilmu perpustakaan. Manfaat mengikuti webinar untuk pustakawan diantaranya menjadikan pustakawan menjadi aktif belajar, menambah pengetahuan atau wawasan mengenai isu-isu terkini mengenai kepustakawanan dan peluang berjejaring. Keunggulan mengikuti webinar ini tidak memerlukan biaya mahal bahkan gratis, sharing informasi secara cepat, mendapatkan sertifikat dan tidak perlu hadir secara fisik.

Tahun 2021 kegiatan konferensi/seminar ini yang diikuti secara webinar oleh Kepala Bagian Perpustakaan dan pustakawan sebagai berikut:

No	Judul Seminar	Penyelenggara	Tanggal	Peserta
1	1st International Discussion on Library Science: Library and Information Science Career in Malaysia	Lib Talk Community	15 Januari 2021	Mustika Wati
2	Sosialisasi Gerakan Nasional Membaca melalui Webinar dengan Tema "Penguatan Budaya Literasi Melalui Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital untuk Mewujudkan SDM Unggul"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	4 Februari 2021	Qatriatna, Djati
3	MIP Zoominar Series "Peluang Bekerja di Luar Negeri dan Lembaga Asing bagi Lulusan LIS"	Manajemen Informasi dan Perpustakaan UGM	10 Februari 2021	Mustika Wati
4	SLA (Special Libraries Association) Open Board Meeting	SLA Asia	10 Februari 2021	Mustika Wati
5	Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 2 "Sertifikasi Profesi Pustakawan & Kiat Pustakawan Kompeten dalam Sertifikasi"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	3 Maret 2021	Mustika Wati, Tenny Rosanti, Indira, Magfira
6	International Talks "Visiting International Librarians"	SLA Asia & Perpustakaan UIN SUKA Yogyakarta	16 Maret 2021	Mustika Wati,
7	Librarian Talks: Dari Sudut Bercerita	Perpusnas	17 Maret 2021	Mustika Wati, Magfira
8	Forum Diskusi "Butir Kegiatan dan Bukti Fisik Jabatan Fungsional Pustakawan dan Prosedur Penyusunan dan Pengusulan DUPAK Pustakawan"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	31 Maret 2021	Qatriatna, Tenny Rosanti

9	Forum Diskusi Ilmiah Pustakawan "Update Perkembangan Ilmu Perpustakaan dan Perpustakaan di Dunia"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	6 April 2021	Mustika Wati, Tenny Rosanti
10	Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa (Pelestarian Naskah Kuno)	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	22 April 2021	Qatriatna
11	Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	28 April 2021	Qatriatna
12	Penguohan & Talkshow bersama Duta Baca Indonesia dengan Tema "Berdaya dengan Buku"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	30 April 2021	Qatriatna
13	Bincang Siang Bedah Buku dan Workshop "Public Speaking for Change"	Kemenkeu	3 Mei 2021	Djati
14	Webinar Hut Perpunas Tema "41 Perpunas dalam Torehan Peradaban."	Perpunas	17 Mei 2021	Djati
15	Sertifikasi Kompetensi Pustakawan "Urgensi Sertifikasi Kompetensi dalam Penjaminan Mutu Pustakawan di Indonesia"	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	27 Mei 2021	Mustika Wati, Qatriatna, Tenny Rosanti, Indira, Djati, Magfira, Rini
16	Perpunas Writers Festival 2021 Tema "Menulis, Membumikan Literasi."	Perpunas	16 Juni 2021	Djati
17	Bedah Buku Virtual "Catatan Pustakawan: Kreasi di Masa Pandemi"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PD IPI Jawa Barat	24 Juni 2021	Indira

18	Bedah Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	25 Juni 2021	Magfira
19	Bibliobattle dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Perpustakaan Kemenag	15 Juli 2021	Magfira
20	Perpustakaan Khusus VS Covid 19	Perpustakaan Nasional RI	29 Juli 2021	Magfira
21	Talkshow Penulisan 76 tahun Indonesia Merdeka	Perpustakaan Nasional RI	23 Agustus 2021	Magfira
22	Webinar Internasional: Rekognisi dan Pengembangan Kompetensi Pustakawan di Era Kompetisi Global	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	30 Agustus 2021	Qatriatna
23	Pelestarian Bahan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional RI	31 Agustus 2021	Magfira, Desti
24	Focus Group Discussion (FGD): Peningkatan Kualitas Tanya Pustakawan (Ask a Librarian) sebagai Perwujudan Layanan Referensi Virtual	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	16 September 2021	Mustika Wati, Tenny Rosanti
25	Webinar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan Tema "Penguatan Kompetensi Pustakawan di Era Perpustakaan Inklusif"	BRIN	21 September 2021	Mustika Wati, Djati Kharisun Alaikum, Rini
26	Talkshow Perpusnas dan Kemenag Tema "Literasi Digital dalam Moderasi Beragama menuju Indonesia Unggul"	Perpusnas dan Kemenag	23 September 2021	Djati, Desti, Kharisun Alaikum
27	Bisa Berkawan (Bincang Bersama Pustakawan)	Kementerian PUPR	27 September 2021	Magfira, Desti, Kharisun Alaikum
28	Webinar Pojok Statistik Virtual Tempat Asik Belajar Statistik	Badan Pusat Statistik	28 September 2021	Djati, Kharisun Alaikum
29	Sharing Knowledge Online "Permainan Mereview Buku Bibliobattle"	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan,	30 September 2021	Mustika Wati, Indira, Desti

		Kementerian Perdagangan		
30	Libtalk Series: Layanan Referensi "Layanan Referensi Series: Konsep Layanan Referensi di Indonesia"	Perpusnas RI	1 Oktober 2021	Mustika Wati, Qatriatna, Indira, Djati, Kharisun Alaikum, Rini
31	Seminar Nasional GBPM 2021 "Kebhinekaan Budaya Indonesia, Prestasi Literasi Bunga"	Perpusnas dan GPMB	5 Oktober 2021	Djati, Kharisun Alaikum
32	Workshop Online: Reading Skill Workshop	Telkom University	6 Oktober 2021	Djati, Kharisun Alaikum
33	Digital Literacy Skills for Smess	Telkom University	7 Oktober 2021	Djati
34	Libtalk Series: Layanan Referensi di Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	8 Oktober 2021	Qatriatna, Indira, Desti, Kharisun Alaikum
35	Human Literacy: Critical Thinking Process	Telkom University	8 Oktober 2021	Djati, Kharisun Alaikum
36	Rembug Duta Baca Se-Indonesia	Perpustakaan Nasional RI	9 Oktober 2021	Magfira
37	Selasa Pustaka #13 "101 LIS Scholarships"	ISIPII	19 Oktober 2021	Mustika Wati
38	Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta	21 Oktober 2021	Mustika Wati
39	Libtalk Series: Layanan Referensi di Perpustakaan Khusus	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	22 Oktober 2021	Qatriatna, Indira, Magfira, Desti
40	Webinar Sumber Daya Manusia Perpustakaan Unggul di Era Digital menuju Indonesia Emas	FPKI dan Perpusnas Deputi Bidang Pengembangan	22 Oktober 2021	Qatriatna, Desti

		Bahan Pustaka dan Jasa Informasi		
41	Penguatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Perpustakaan Khusus	Pustaka Kementerian Pertanian	27 Oktober 2021	Qatriatna, Tenny Rosanti, Djati, Desti
42	Information For Society; The Future is Now	Universitas Indonesia	28 Oktober 2021	Magfira
43	Bibliobattle	Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	30 Oktober 2021	Magfira
44	Peluncuran dan Diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional Indonesia	Perpustakaan Nasional	3 November 2021	Qatriatna, Djati
45	Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	15 November 2021	Qatriatna, Magfira
46	Peran Perpustakaan dalam Mendukung Transformasi Hybrid University	Perpustakaan FEB UNPAD	16 November 2021	Qatriatna
47	Manajemen Koleksi Perpustakaan Berbasis SNI ISO	Badan Standardisasi Nasional	18 November 2021	Magfira, Desti
48	Pentingnya Bacaan Anak di Keluarga	Perpustakaan Nasional RI	18 November 2021	Magfira
49	Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat	Perpustakaan Nasional RI	25 November 2021	Magfira
50	Mengabdikan di Jalan Literasi	Perpustakaan Nasional RI	29 November 2021	Magfira
51	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDII) 2021	Forum Perpustakaan Digital Indonesia bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional	30 November 2021	Mustika Wati, Qatriatna, Tenny Rosanti, Indira, Desti, Rini

52	Pengukuhan Pustakawan Ahli Utama	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	6 Desember 2021	Qatriatna, Magfira
53	Kuliah Tamu Klasifikasi (2) "Pengolahan Bahan Pustaka dengan Menggunakan Skema Klasifikasi National Library of Medicine Classification (NLMC)	Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan	7 Desember 2021	Mustika Wati
54	Pendataan Perpustakaan Khusus	Dispusip Jakarta	8 Desember 2021	Mustika Wati
55	Registrasi Perpustakaan untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus pada Sistem SIAP Jak di DKI Jakarta	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	8 Desember 2021	Magfira
56	Forum Komunikasi Pustakawan "Prosedur Penyusunan DUPAK Pustakawan: Tantangan dan Inovasi di Masa Pandemi"	Perpustakaan Kementerian Perdagangan	9 Desember 2021	Mustika Wati
57	Pembinaan Perpustakaan tentang Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perpustakaan dan Registrasi Perpustakaan di SIAP Jak	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	16 Desember 2021	Magfira
58	Peran Pustakawan dalam Mendukung Literasi Digital Nasional	Perpustakaan Nasional. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	16 Desember 2021	Qatriatna, Magfira,

Selain itu Perpustakaan DPR RI juga aktif menyelenggarakan literasi untuk masyarakat melalui seminar yang diadakan oleh Perpustakaan DPR RI. Seminar dilaksanakan dengan metode hybrid maupun melalui webinar. Peserta seminar berasal dari internal dan eksternal Sekretariat Jenderal DPR RI. Jumlah peserta zoom seminar selama tahun 2021 tercatat sebanyak 1.233 orang. Dengan mengusung tema seminar yang menarik dan beragam, Perpustakaan berhasil melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan seminar sebagai berikut:

1. Ngobrol Buku Bersama Penulis Felix K. Nesi pada tanggal 29 Januari 2021;
2. Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Website dengan narasumber Perpustakaan Nasional pada tanggal 11 Februari 2021;

3. Launching dan Bedah Buku “Kiat-kiat Terhindar dari Korupsi: Mitigasi Risiko PA dan KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa” yang disusun oleh Indra Iskandar, dkk. Pada tanggal 1 Maret 2021;
4. Kegiatan Klub Buku DPR “Visi, Imaji dan Diksi” dalam puisi-puisi Joko Pinurbo pada tanggal 10 Maret 2021;
5. Webinar Sehat, Bugar, dan Panen Pahala selama Ramadhan pada tanggal 14 April 2021;
6. Webinar Spesial Hari Kartini: Ngabubu Read Bareng Mbak Kalis pada tanggal 30 April 2021;
7. Penyelenggaraan Seminar Perpustakaan dalam rangka Akreditasi Perpustakaan berjudul: Sharing Session “Akreditasi A, Kenapa Tidak!” pada tanggal 25 Mei 2021;
8. Bedah Buku “Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG’s 14” pada tanggal 25 Juni 2021;
9. Webinar Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 31 Agustus 2021;
10. Seminar Mewujudkan Parlemen Modern Melalui Literasi Digital pada tanggal 26 Oktober 2021;
11. Focus Group Discussion (FGD) Radio Frequency Identification Perpustakaan pada tanggal 1 November 2021;
12. Focus Group Discussion (FGD) Pencacahan dan Penyiangan Koleksi pada tanggal 1 November 2021;
13. Talkshow Peluang Pekerja Seni Pertunjukan di Era Digital tanggal 13 Desember 2021



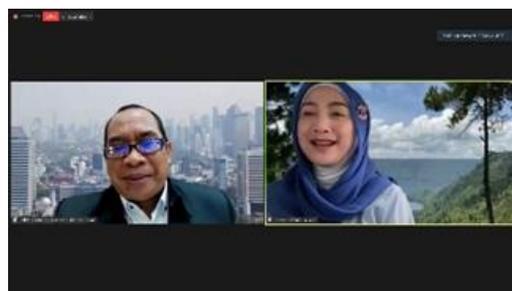
Bedah Buku Kiat-kiat Terhindar dari Korupsi (1 Maret 2021)



Lomba MC dan Tiktok (26 Agustus 2021)



Bedah Buku Platform Perikanan Nasional Mencapai SDG’s 14 (25 Juni 2021)



Webinar Semangat Kemerdekaan: Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Informasi di Masa Pandemi Covid-19 (31 Agustus 2021)



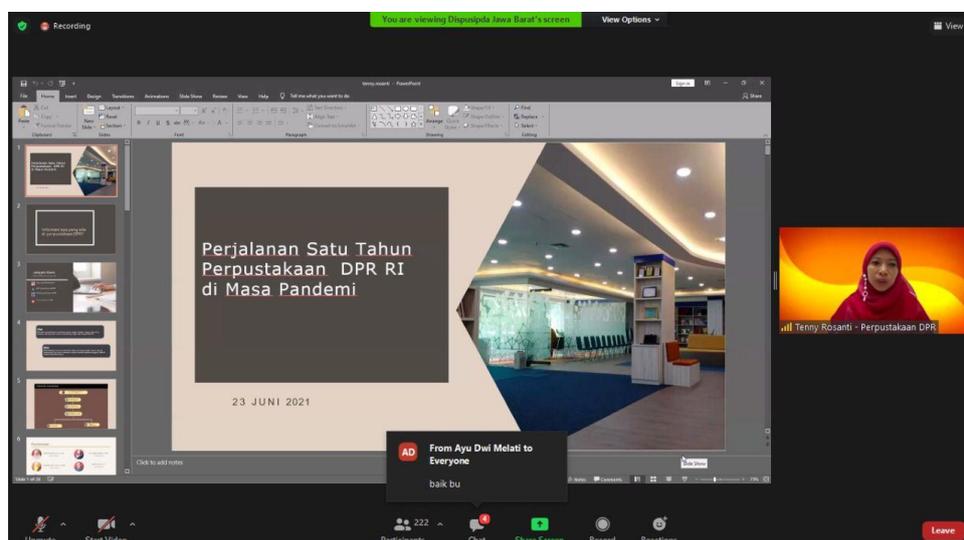
Sharing Akreditasi A, Kenapa Tidak! (25 Mei 2021) Peluang Pekerja Seni Pertunjukan Di Era Digital (14 Desember 2021)

Peran aktif pustakawan DPR RI tidak hanya dalam menyelenggarakan seminar perpustakaan saja tetapi berperan sebagai narasumber dalam berbagai seminar yang diadakan oleh lembaga lain. Adapun peran serta pustakawan sebagai narasumber sebagai berikut:

No	Judul Seminar	Penyelenggara	Tanggal	Narasumber
1	Bedah Buku "Catatan Pustakawan: Kreasi Di Masa Pandemi"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Barat	24 Juni 2021	Tenny Rosanti
2	Presentasi Jumat Berkah "Parlemen Terbuka: Dukungan dan Layanan"	Pusdiklat DPR RI	05 Februari 2021	Mustika Wati
3	MC International Talks: Visiting International Librarians #4 "Medical Librarians"	SLA Asia & Perpustakaan UIN SUKA Yogyakarta	15 April 2021	Mustika Wati
4	Presentasi "Magang DPR RI: Perancangan Satu Data: Layanan Perpustakaan mendukung Big Data DPR" ke Mahasiswa Magang Kampus Merdeka	Pusdiklat DPR RI	10 September 2021	Mustika Wati



Presentasi Jumat Berkah "Parlemen Terbuka: Dukungan dan Layanan" (5 Februari 2021)



Bedah Buku "Catatan Pustakawan: Kreasi Di Masa Pandemi" (24 Juni 2021)

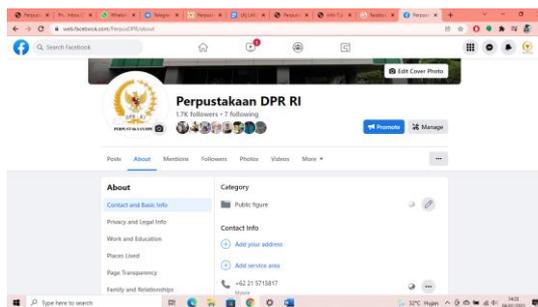
3.5. Promosi Perpustakaan

Dalam rangka peningkatan kapasitas layanan perpustakaan dilakukan promosi perpustakaan melalui pembuatan dokumentasi foto-foto perpustakaan dan pembuatan video promosi perpustakaan. Perpustakaan DPR RI secara berkala menerbitkan INLIT yang merupakan Newsletter Perpustakaan. INLIT adalah media informasi, komunikasi dan literasi antara perpustakaan dengan para pengguna dalam bentuk e-newspaper. Melalui INLIT, kabar kegiatan dan koleksi terbaru selalu disajikan dengan bahasa yang segar, layout, warna dan grafis yang menarik. INLIT terbit sebulan sekali. Menampilkan informasi kegiatan perpustakaan seperti webinar, artikel perpustakaan, dan abstraksi buku. Inlit Pertama kali terbit pada bulan Februari 2021 dengan nama Pusdep. Berganti resmi menjadi Inlit mulai bulan April 2021. INLIT dapat diakses di website perpustakaan DPR, www.perpustakaan.dpr.go.id.



Newsletter INLIT

Perpustakaan DPR juga memiliki kanal-kanal media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tiktok.



Facebook

(<https://web.facebook.com/PerpusDPR>)

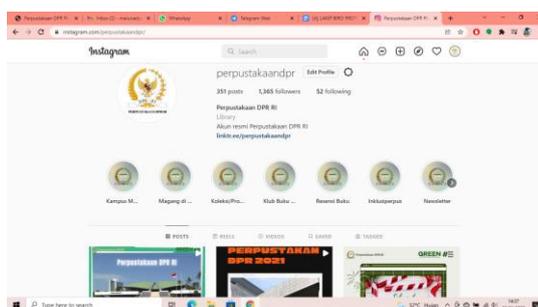
Jumlah Followers: 1.718 orang



Twitter

(<https://twitter.com/perpustakaan DPR>)

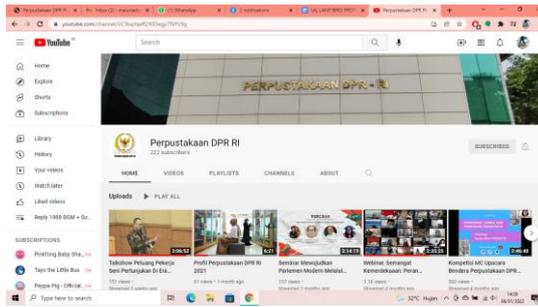
Jumlah Followers: 1.653 orang



Instagram

(<https://www.instagram.com/perpustakaan DPR RI>)

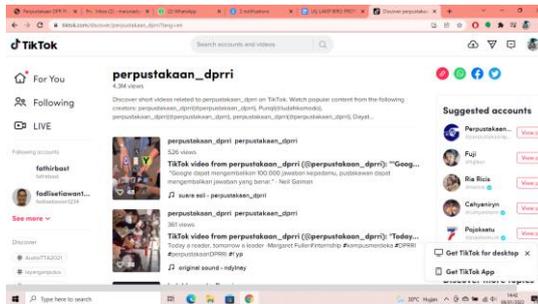
Jumlah Followers: 1.365 orang



Youtube

(<https://www.youtube.com/channel/UC9sqYaaffZA93egy7fVPz9g>)

Jumlah Subscribers: 222 orang



TikTok

(https://www.tiktok.com/discover/perpustakaan_dpri?lang=en)

Jumlah Followers: 16 orang

3.6. Survei Peningkatan Layanan Perpustakaan

Layanan yang tepat guna sesuai kebutuhan pemustaka merupakan tujuan dari berbagai program perpustakaan. Oleh karenanya selain perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dibutuhkan juga evaluasi. Evaluasi melalui penyelenggaraan survei "Peningkatan Layanan Perpustakaan". Survei yang dibuat oleh internal perpustakaan baru pertama kali dilaksanakan, tahun 2021 pada tahapan survey perpustakaan menyusun daftar pertanyaan terkait tingkat kunjungan, jenis layanan, kualitas layanan, sarana prasarana, koleksi (kepuasan, kebutuhan responden), kegiatan perpustakaan, SDM perpustakaan, desain perpustakaan. Survei dilaksanakan dengan mengambil populasi survei sebanyak 7.692 orang terdiri dari Anggota DPR RI, PNS Setjen DPR RI, Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Tenaga Ahli AKD, Tenaga Ahli Fraksi, Staf Administrasi Anggota, Non ASN/PPN ASN. Dari jumlah populasi tersebut diperoleh sasaran jumlah sampel yang perlu dipenuhi sebanyak 366 responden.

3.7. Akreditasi Perpustakaan

Pentingnya mutu atau kualitas telah menjadi perhatian pengelola perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI telah menyusun standar yang dapat dijadikan acuan minimal dalam penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas. Suatu bentuk formal pengakuan terhadap pemenuhan standar tersebut yaitu dengan pelaksanaan akreditasi perpustakaan. Akreditasi perpustakaan bertujuan untuk memperbaiki perpustakaan yang diakreditasi sehingga bermanfaat untuk membangun kualitas perpustakaan. Sesuai amanat UU RI No 43 tahun 2007 dan PP No 24 tahun 2014, Perpustakaan Nasional telah membentuk Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (LAP-N). Sertifikat terakreditasi dapat diperoleh suatu perpustakaan berdasarkan jumlah nilai tertimbang dari

komponen koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, serta penguat.

Perpustakaan DPR RI telah memperoleh Akreditasi B pada tahun 2019, tetapi mulai tahun 2021 Perpustakaan DPR RI berusaha untuk meningkatkan capaian nilai akreditasi menjadi A. Beberapa langkah telah dilakukan antara lain merencanakan kegiatan akreditasi, membentuk tim persiapan akreditasi, FGD, melakukan asesmen mandiri (self assessment), menyiapkan berkas pendukung. Saat ini tahapan proses akreditasi telah memasuki tahap mengirimkan surat permohonan dan berkas data pendukung. Perpustakaan DPR RI berharap memperoleh predikat akreditasi A di tahun 2022.

3.8. Literasi Informasi

Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan letak informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan juga mampu menggunakan informasi tersebut secara efektif. Perpustakaan merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan literasi informasi bagi pemustaka. Literasi informasi di perpustakaan dilakukan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman kepada pemustaka, misalnya cara menemukan informasi yang dibutuhkan, cara penyusunan dan pengaturan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan, pengenalan terhadap jenis dan sumber informasi di setiap bagian dalam perpustakaan, bagaimana pemanfaatan sumber referensi, apa ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di perpustakaan, bagaimana layanan dan fasilitas perpustakaan, termasuk pengetahuan terhadap basis data, OPAC (Online Public Access Catalog), dan penelusuran berbasis online seperti e-book, e-journal, dan lainnya.

Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih terjadi, kegiatan Literasi Informasi yang dilakukan oleh Perpustakaan DPR RI sedikit jumlahnya karena kegiatan ini biasanya dilaksanakan secara berkelompok. Kegiatan Literasi Informasi yang dilakukan yaitu Penerimaan Audiensi Mahasiswa Magang Kampus Merdeka pada tanggal 29 Oktober 2021 dan Kunjungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 25 November 2021.



Audiensi Mahasiswa Magang Kampus Merdeka (29 Oktober 2021)



Kunjungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (25 November 2021)

4. Bagian Protokol

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara dan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal

- 4.1. Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Delegasi Parlemen Luar Negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Jakarta.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 tidak ada kunjungan delegasi, maka alokasi anggaran yang diterima dari APBN dilakukan refocusing

- 4.2. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Pimpinan DPR RI dan BKSAP DPR RI di Daerah.

Program kegiatan kunjungan Delegasi Parlemen ke daerah terkait dengan program kunjungan delegasi di Jakarta, karena pandemi COVID-19 program ini juga tidak dapat terlaksana. Anggaran yang tersedia juga dilakukan revisi untuk kegiatan peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Protokol DPR RI dan pengadaan peralatan kesehatan pencegahan pandemi COVID-19

- 4.3. Penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta.

Pada indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan penerimaan tamu delegasi sekretariat parlemen luar negeri yang akan mengunjungi Indonesia sebagai tamu resmi Sekjen DPR RI di Jakarta untuk tahun anggaran 2020, kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran, sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan kunjungan tamu resmi ke daerah karena masa pandemi COVID-19.

- 4.4. Pengurusan VIP Room

Realisasi di tahun 2020 sebesar 39,46% sementara capaian realisasi tahun 2021 menjadi 95,63%. Kenaikan realisasi di tahun 2021 sebanyak 56,17 % dikarenakan membaiknya kondisi pandemi COVID 19.

Pelaksanaan Kegiatan Pengurusan VIP :

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Total
Jumlah	4	4	4	3	4	6	2	3	5	9	8	10	61

Kegiatan Pengurusan VIP dimulai dari pengurusan surat ijin penggunaan ruangan VIP Room, baik di Bandara Soekarno Hatta maupun Bandara Halim

Perdana Kusuma kepada Kepala Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk Pimpinan DPR RI. Berdasarkan surat ijin ini selanjutnya petugas protokol melakukan koordinasi dengan bagian *Office In Charge* (OIC) Bandara, untuk mengurus surat penggunaan VIP beserta fasilitas yang diperlukan. Kegiatan Pimpinan DPR RI melalui VIP bandara adalah dalam rangka kunjungan kerja ke daerah maupun kunjungan/muhibah ke luar negeri.

4.5. Peningkatan profesionalisme dan pelayanan protokol DPR RI.

Dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Layanan Keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, dilakukan beberapa program kegiatan, antara lain :

- a. *Upgrade* pengetahuan keprotokolan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil/PPNASN Biro Protokol, dengan mengundang Narasumber Keprotokolan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Keprotokolan;
- b. Pengadaan pakaian dan sepatu pegawai protokol, hal ini diharapkan agar *performance* petugas protokol selalu terjaga kerapiannya;
- c. Asesmen bagi PPNASN Bagian Protokol Setjen DPR RI berguna untuk mengukur kinerja PPNASN di Bagian Protokol baik yang bertugas di Bandara, Komisi, maupun di Bagian Protokol;
- d. Pembayaran Gaji dan tunjangan lainnya bagi PPNASN Bagian Protokol;
- e. Pengadaan dan perawatan Alat Komunikasi serta operasional kantor guna menunjang kegiatan layanan Keprotokolan;
- f. Kerjasama antara protokol DPR RI dengan protokol lembaga dan Bandara guna meningkatkan pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan, Anggota, dan Pejabat Setjen DPR RI dengan Pembentukan Tim Keprotokolan Lembaga dan Bandara;
- g. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ke-Dua dalam rangka memberikan layanan keprotokolan di bidang layanan *Lounge* dan layanan Kedatangan dan kepulangan, baik di bandara di Jakarta maupun di bandara daerah. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain :
 - PT. Garuda Indonesia meliputi layanan check-in premium, layanan business class lounge, dan layanan jalur khusus pada security check point di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
 - PT. Bumi Liputan Jaya (Blue Sky) di terminal 2 Bandara Soekarno Hatta;
 - KSO Angkasa Pura Solusi Trikama Boga (Saphire Lounge) di Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno Hatta;
 - Koperasi Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) Satya Ardhia di Bandara Halim Perdana Kusuma, meliputi layanan lounge, Penjemputan dan pengantara dari dan ke pesawat, dan jalur khusus;
 - PT. Gapura Angkasa kerjasama di bandara daerah dengan ruang lingkup, layanan penjemputan dan pengantaran, check-in, bagasi, dan lounge. Kerjasama di bandara daerah tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, semula kerjasama di 24 bandara daerah menjadi 38 bandara.

Kegiatan layanan keprotokolan di bandara berdasarkan satuan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan di Bandara (satuan kegiatan):

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Bandara Soetta	210	342	358	424	342	409	114	141	520	755	581	685	4881
Bandara Halim PK	24	58	139	130	90	152	26	30	99	102	148	140	1138
TOTAL													6019

Sedangkan kegiatan layanan keprotokolan di bandara berdasarkan jumlah layanan dengan satuan pack/perorang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Layanan Keprotokolan di Bandara (satuan pack/orang):

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
Bandara Soetta	621	1192	1508	1574	1248	1366	273	305	1958	2652	2943	3749	19389
Bandara Halim PK	35	98	271	242	166	254	65	76	216	216	200	280	2119
TOTAL													21508

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan jasa layanan keprotokolan kepada anggota Dewan di 38 bandara tersebut, maka dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pihak PT. Gapura Angkasa di daerah.

4.6. Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI



Gambar 3
Pendampingan Pimpinan DPR RI



Gambar 4
Pendampingan Pimpinan DPR RI

Pagu Anggaran Tahun 2020 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 320.400.000,-. Realisasi di tahun 2020 sebesar 90,35% sementara capaian realisasi tahun 2021 menjadi 99,93%, yaitu adanya kenaikan sebesar 9,58%. Peningkatan ini didapatkan dari pelaksanaan pendampingan kegiatan Pimpinan DPR RI di dalam kota, pendampingan kegiatan di Jawa Barat (tidak menginap), dan pendampingan kegiatan di luar kota.

Pendampingan keprotokolan kegiatan Pimpinan DPR RI dilaksanakan untuk memberikan kepastian tata penghormatan, tata upacara, dan tata tempat pada pelaksanaan acara. Di samping hal tersebut, pendampingan keprotokolan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Pimpinan DPR RI berjalan dengan lancar. Kegiatan pendampingan keprotokolan kepada Pimpinan DPR RI selama tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendampingan Kegiatan Pimpinan DPR RI:

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Total
Pendampingan Dalam Kota/ Jumlah	30	29	20	36	32	27	14	35	11	16	22	22	294
Pendampingan Jawa Barat/ Jumlah	10	6	4	0	3	0	0	0	0	0	3	24	50
Pendampingan Luar Kota/ Jumlah	0	2	0	4	0	4	0	5	2	0	0	0	17

4.7. Penyelenggaraan Supervisi Kegiatan Protokoler di Alat Kelengkapan Dewan

Pagu anggaran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 91.643.000,- dari tahun anggaran 2020. Realisasi serapan anggaran tahun 2020 sebesar 99,69% dan realisasi serapan anggaran tahun 2021 99,94%.

4.8. Rapat Paripurna DPR RI Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2022



Gambar 5

Rapat Paripurna DPR RI Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian RAPBN TA 2022

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 97,61 %, capaian realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 99,98% terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 3,37%. Dengan rangkaian kegiatan Pidato Presiden ini bersamaan harinya dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, maka susunan acara menjadi padat dan jeda waktu istirahat yang singkat. Namun kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa adanya *complain* dari Pimpinan DPR/Anggota DPR atau mitra kerja yang hadir. Untuk melaksanakan acara kegiatan tersebut Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667).

Kegiatan Sidang Tahun 2020 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di karenakan pandemi Virus Covid-19 maka untuk menjaga protokol kesehatan perlu diterapkan *Physical distancing* sehingga kegiatan sidang Pidato Presiden dihadiri sekitar seperdelapan dari undangan normal. Undangan Fisik hanya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Ketua dan Wakil Lembaga Negara, Ketua fraksi, Perwakilan Provinsi Anggota DPD, Menko, Mensesneg, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bapenas dan Seskab, Panglima TNI, Kapolri dan Ketua Umum Partai Politik dan undangan lainnya menggunakan jalur *Virtual*

Zoom. Korps Musik Mabes POLRI yang mengiringi lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan memainkan lagu-lagu perjuangan dibatasi menjadi 24 personil.

4.9. Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI tanggal 16 Agustus 2021



Gambar 6

Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT RI

Pagu Anggaran Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2021 terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan, dan belanja jasa lainnya.

Realisasi di tahun 2020 sebesar 95,20 %, capaian realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 99,97% dengan selisih kenaikan sebesar 4,77%. Acara Sidang Bersama diselenggarakan setiap tahun dan secara bergantian oleh DPR dan DPD dan kegiatan Pidato Kenegaraan Sidang Bersama tahun ini diselenggarakan secara bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR.

4.10. Rapat Paripurna HUT DPR RI



Gambar 7

Sidang Paripurna Penyerahan RAPBN

Realisasi di tahun 2020 sebesar 95,58 %, sementara capaian realisasi tahun 2021 sebesar 99,99% yaitu adanya selisih kenaikan sebesar 4,41%.

Dengan rangkaian kegiatan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-76 dengan agendanya mendengarkan Pidato Ketua DPR RI dan penyerahan Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021. Laporan Buku Kinerja diserahkan oleh Ketua DPR didampingi para Wakil Pimpinan DPR kepada para Ketua Fraksi. *Physical distancing* juga diterapkan pada acara ini, Acara ini hanya dihadiri oleh Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, Komisi, AKD dan Kapoksi dan susunan acara berbeda yaitu dengan tidak adanya pemotongan tumpeng. Sedangkan Anggota DPR, Pimpinan MPR dan DPD, Mantan Pimpinan DPR, Ketua Lembaga Negara, Mantan Eselon I DPR, Sekjen AIPA diundang melalui jalur Virtual Zoom.

4.11. Pelantikan Anggota DPR dan Pejabat Setjen DPR



Gambar 8
Pelantikan PAW

Pagu Anggaran pelantikan Anggota DPR dan pejabat Setjen DPR Tahun 2021 terdiri dari belanja bahan, dan belanja jasa profesi. Realisasi di tahun 2020 sebesar 89,25 % sementara capaian realisasi tahun 2021 sebesar 98,83%, mengalami kenaikan sebesar 9,58%.

4.12. Kegiatan Protokoler lainnya



Gambar 9 Kampus Merdeka

Pagu Anggaran Kegiatan Protokoler lainnya Tahun 2021 terdiri dari belanja bahan, honor output kegiatan, dan belanja jasa lainnya. Realisasi di tahun 2020 sebesar 97,49 % sementara capaian realisasi tahun 2021 sebesar 99,92%, mengalami kenaikan sebesar 2,43%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Perbandingan realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2020			2021		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.163.981.000	1.142.977.200	98,20	32.896.725.000	31.770.376.712	96,58

Pagu anggaran Biro Protokol dan Humas pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 32.896.725.000. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 31.770.376.712 atau 96,58%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran Biro Protokol tahun 2020, maka terjadi penurunan sebesar 1,62% dikarenakan adanya penambahan anggaran akibat restruktur organisasi dengan bergabungnya Bagian Arsip, Bagian Perpustakaan dan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum. Uraian kondisi pagu anggaran dan realisasi per Bagian pada Biro Protokol dan Humas pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bagian Arsip

Perbandingan realisasi anggaran Bagian Arsip Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

2020			2021		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.965.908.000	1.793.375.135	91,22	2.950.037.000	2.847.230.715	96,52

Realisasi anggaran 2021 terdapat beberapa perubahan, banyak dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan segala jenis kegiatan Bagian Arsip seperti kegiatan workshop dan pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan. Meskipun serapan anggaran Bagian Arsip tahun 2021 sudah cukup optimal yaitu 96,52%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 masih agak berkurang dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, dimana pengelolaan Museum dialihkan kepada Unit kerja lain, sehingga anggaran pengelolaan Museum ikut berpindah pengelolaannya.

2. Bagian Perpustakaan

Perbandingan Realisasi Anggaran Bagian Perpustakaan Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2020			2021		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4.465.066.000	3.942.926.543	88,31	5.608.614.000	5.279.738.234	94,14

Terlihat pada tabel diatas bahwa Bagian Perpustakaan mengalami peningkatan serapan anggaran yang cukup optimal dimana pada tahun 2020 sebesar 88,31% dan tahun 2021 sebesar 94,14%. Adapun terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Perpustakaan, yakni:

- Kegiatan Upgrade Online Jurnal System untuk Peneliti tertunda/tidak terealisasi di tahun 2021 karena salah satu jurnal yaitu jurnal Politica sedang dalam tahap akreditasi sehingga upgrade dikhawatirkan menimbulkan masalah pada tampilan maupun data yang telah ada;
- Kegiatan Seminar/FGD/Kongres/Konferensi di masa pandemi Covid-19 sebagian besar dilaksanakan secara online sehingga anggaran untuk menghadiri seminar dan biaya registrasi terkait kegiatan tersebut tidak terserap dan direvisi untuk kegiatan lain;
- Pembayaran Honorarium Tim terdapat pembatasan sehingga sebagian besar anggota tim terkena matrik;
- Terdapat sisa anggaran dari kegiatan lain yang sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat dioptimalkan untuk direvisi kembali ke kegiatan lain dikarenakan keterbatasan waktu revisi dan pelaksanaan kegiatan.

3. Bagian Humas dan Pengelolaan Museum

Perbandingan Realisasi Anggaran Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2020			2021		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5.028.531.000	4.249.824.800	84,51	8.218.345.000	7.819.311.375	95,14

Bagian Humas dan Pengelolaan Museum mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 3.189.814.000,- dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi yang menggabungkan Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat di Bagian Acara dan Sub Bagian Museum yang semula di Bidang Arsip dan Museum. Selain itu, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum juga mengalami peningkatan serapan secara optimal sebesar 10,63% dikarenakan adanya beberapa hal, yakni:

- Kegiatan Kehumasan dan Museum, baik berupa seminar, FGD maupun pameran yang dilaksanakan secara hybrid;

- Menciptakan Aplikasi layanan kunjungan secara virtual;
- Melakukan revisi dan optimalisasi anggaran dari kegiatan yang sekiranya terdapat pembatasan dan tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi

4. Bagian Protokol

Perbandingan Realisasi Anggaran Bagian Protokol Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2020			2021		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
7.201.295.000	7.098.536.755	98,57	15.860.251.000	15.618.215.388	98,47

Terlihat pada tabel diatas bahwa Bagian Protokol mengalami penurunan serapan anggaran yang cukup dimana pada tahun 2020 sebesar 98,57% (sebelum restruktur bagian menjadi Bagian Protokol) dan tahun 2021 sebesar 98,47%. Adapun terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Protokol, salah satunya yakni mengalokasikan Anggaran yang tersedia juga dilakukan revisi untuk kegiatan peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Protokol DPR RI dan pengadaan peralatan kesehatan pencegahan pandemi COVID-19.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Biro Protokol dan Humas mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan. Biro Protokol dan Humas ini membawahi beberapa bagian yaitu Bagian Arsip, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, Bagian Perpustakaan dan Bagian Protokol serta kelompok jabatan fungsional tertentu.

Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021 disusun berdasarkan kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Protokol dan Humas. Laporan ini menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh segenap jajaran yang berada dalam unit kerja ini selama tahun anggaran 2021. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin baik dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Biro Protokol dan Humas merupakan penjabaran dari sasaran strategis dari unit-unit yang terdapat didalamnya.

Pada 2021, Biro Protokol dan Humas memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yang tersebar pada tiap-tiap bagian atau unit kerja, dan direpresentasikan dalam bentuk capaian *outcome*. Secara umum, tingkat keberhasilan kinerja kegiatan Biro Protokol dan Humas tampak pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target, dan cenderung meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh Biro Protokol dan Humas selama tahun 2021 dapat dilakukan sesuai target ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sarana prasarana dan jumlah SDM yang terbatas. Sementara pencapaian realisasi kinerja anggaran Biro Protokol dan Humas adalah sebesar 96,58%, diantaranya merupakan hasil dari optimalisasi dan revisi anggaran sebagai bentuk peralihan kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Bertujuan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi agar tercapai kinerja yang ditargetkan, maka Kepala Biro Protokol dan Humas menetapkan kebijakan antara lain:

- Melakukan identifikasi tentang rencana kegiatan dan penyusunan anggaran baik untuk tahun yang akan datang maupun revisi anggaran pada tahun berjalan;
- Memastikan setiap usulan kegiatan mempunyai *outcome* dan *output* yang jelas;
- Pelaksanaan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang efektif.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama baik internal maupun eksternal Biro Protokol dan Humas juga perlu dilakukan dengan lebih intensif demi tercapainya pelayanan yang optimal kepada DPR RI. Dalam laporan kinerja ini harus menjadi pendorong kinerja sekaligus evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja, baik kinerja

perorangan maupun kinerja organisasi dan kinerja keuangan dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan Biro Protokol

B. Rekomendasi

Hasil capaian dari indikator kinerja Biro Protokol dan Humas sudah melampaui target. Namun perlu ada perbaikan untuk keberhasilan kinerja tahun depan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam menyusun penetapan target indikator kinerja di tahun berjalan, agar perbandingan capaian yang dihasilkan dapat selaras;
- Diperlukannya penambahan SDM sesuai kebutuhan Bagian Perpustakaan dan Bagian Arsip dengan mempertimbangkan Analisis Beban Kerja (ABK);
- Diperlukannya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja SDM baik yang *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO);
- Pelaksanaan Pelatihan / Workshop terkait peningkatan layanan keprotokolan dan kehumasan.



**BIRO PROTOKOL DAN HUMAS
SETJEN DPR RI
TAHUN 2021**